



LMCK

(LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA)



TRIWULAN I | 2025

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI



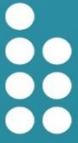
Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung Tahun 2025

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung
Tahun 2025**

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Dikonsep	Endri Gunawan, A.Md Zenitta Utami, A.Md.Tra	Staf Perencanaan dan Pelaporan	16/4 2025 16/4 2025	
2	Diperiksa	Budi Santoso, S.SiT.,M.M.Tr	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	16/4/25	
3	Diperiksa	Djoko Srijanto, ATD.,M.Si	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	16/4 2025	
4	Diperiksa	Dedi Setiawan, S.Sos	Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	16/4 2025	
5	Diperiksa	Taofan Andriana, S.T.M.A	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan	16/04/2025	
6	Disetujui	Budi Santoso, S.SiT.,M.M.Tr	Plt. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung	16/4/25	



KATA

PENGANTAR

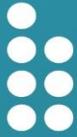
Kata Pengantar

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat.

Sebagai institusi publik, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Kelas II Lampung bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Kelas II Lampung merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Kelas II Lampung yang menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2025 serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja Tahun 2025.



• RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan Eksekutif

Laporan Monitoring Kinerja Pemerintah (LMCK) Triwulan I Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung Tahun 2025 merupakan tolak ukur instansi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab.

Laporan ini mencakup pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2025 dengan total jumlah Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebanyak 9 Indikator dari 5 Sasaran Kegiatan.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung telah melaksanakan dengan baik, Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$) sebanyak IKK dilaksanakan di tahun 2025.

Hasil pengukuran pencapaian sasaran yaitu sebesar 100%, dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan cukup baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Draft Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025-2029.



Kami berharap Laporan Monitoring Kinerja Pemerintah (LMCK) Triwulan I ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Bandar Lampung, 16 April 2025

**Plt. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Lampung**



Budi Santoso, S.Si.T., M.M.Tr.
NIP. 19840603 200604 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGHANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang	1
I.2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
I.2.1. Bagan Struktur Organisasi	3
I.3. Sumber Daya Manusia	5
I.4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	6
I.5. Sistematika Laporan	8
I.6. Uraian Singkat Perencanaan Strategis.....	11
I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan 2025	13
I.7. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025	14

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja	17
II.2 Pengukuran Capaian Kinerja	18

II.2.1 SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

• Uraian Sasaran Program

II.2.1.1 IKK 1 Presentase pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

a.1 Definisi Indikator Kinerja	23
a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025	23
a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	
• Narasi Dasar Hukum	24
• Narasi Kronologi Target, Revisi Target pada Perjanjian Kinerja	24
• Narasi Faktor Keberhasilan	25
• Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan	25
• Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja	25
• Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja	25

- Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan 26
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang 26

II.2.1.2 IKK 3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi

- a.1 Definisi Indikator Kinerja 26
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025 26
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum 27
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target pada Perjanjian Kinerja 28
 - Narasi Faktor Keberhasilan 28
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan 28
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja 29
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja 29
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan 29
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang 29

II.2.1.3 IKK 6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi

- a.1 Definisi Indikator Kinerja 30
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025 30
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum 31
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target pada Perjanjian Kinerja 31
 - Narasi Faktor Keberhasilan 32
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan 32
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja 32
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja 32
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan 32
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang 33

II.2.2 SK2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat

- **Uraian Sasaran Program**

- II.2.2.1 IKK 3 Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP**

a.1 Definisi Indikator Kinerja	33
a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025	34
a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	
• Narasi Dasar Hukum	34
• Narasi Kronologi Target, Revisi Target pada Perjanjian Kinerja	35
• Narasi Faktor Keberhasilan	35
• Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan	35
• Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja	35
• Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja	36
• Narasi Pagu, Realisasi, dan Capain Keuangan	36
a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang	36

II.2.3 SK3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

- **Uraian Sasaran Program**

- II.2.3.1 IKK 1 Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal**

a.1 Definisi Indikator Kinerja	37
a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025	37
a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	
• Narasi Dasar Hukum	38
• Narasi Kronologi Target, Revisi Target pada Perjanjian Kinerja	38
• Narasi Faktor Keberhasilan	38
• Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan	39
• Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja	39
• Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja	39
• Narasi Pagu, Realisasi, dan Capain Keuangan	39
a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang	39

- II.2.3.2 IKK 5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan**

a.1 Definisi Indikator Kinerja	40
a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025	41
a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	
• Narasi Dasar Hukum	41
• Narasi Kronologi Target, Revisi Target pada Perjanjian Kinerja	42
• Narasi Faktor Keberhasilan	42
• Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan	42
• Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja	42
• Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja	43
• Narasi Pagu, Realisasi, dan Capain Keuangan	43
a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang	43

II.2.3.3 IKK 7 Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

a.1 Definisi Indikator Kinerja	43
a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025	44
a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	
• Narasi Dasar Hukum	44
• Narasi Kronologi Target, Revisi Target pada Perjanjian Kinerja	45
• Narasi Faktor Keberhasilan	45
• Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan	45
• Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja	45
• Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja	45
• Narasi Pagu, Realisasi, dan Capain Keuangan	46
a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang	46

II.2.4 SK4 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

• Uraian Sasaran Program

II.2.4.1 IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

a.1 Definisi Indikator Kinerja	46
--------------------------------------	----

a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025	47
a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	
• Narasi Dasar Hukum	48
• Narasi Kronologi Target, Revisi Target pada Perjanjian Kinerja	48
• Narasi Faktor Keberhasilan	49
• Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan	49
• Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja	50
• Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja	52
• Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan	52
a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang	52
II.2.5 SK5 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Pehubungan Darat Akuntabel	
• Uraian Sasaran Program	
II.2.5.1 IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran DITJEN Perhubungan Darat	
a.1 Definisi Indikator Kinerja	52
a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025	53
a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	
• Narasi Dasar Hukum	53
• Narasi Kronologi Target, Revisi Target pada Perjanjian Kinerja	54
• Narasi Faktor Keberhasilan	54
• Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan	54
• Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja	54
• Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja	56
• Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan	56
a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang	
II.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025	57
II.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2025	57
II.3.1.1. Pagu Anggaran	57
a. 1. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2025	57
a. 2. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2025	57

a. 3. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran	57
II.3.2.2. Refocusing Anggaran Tahun 2025	
a. 1. Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2025	58
a. 2. Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2025	58
a. 3. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja T.A 2025	59
a. 4. Rincian Program-program Kegiatan DIPA T.A 2025	59
II.3.2.3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2017 – 2025 ..	61
II.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2025	
II.3.2.1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Program Kegiatan.....	63
II.3.2.2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025	64
II.3.2.3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025	65
II.3.2.4. Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja	66
II.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	68
II.3.3.1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keu .	68
II.3.3.2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Man .	69
II.4. Hambatan dan Kendala	70

BAB IV PENUTUP

IV.1 Penutup	71
IV.1.1 Ringkasan Capaian	71
IV.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab	73

DAFTAR TABEL

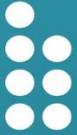
Tabel I. 1 Jumlah Pegawai BPTD Kelas II Lampung	5
Tabel I. 2 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung sesuai Draft Rencana Strategi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung Tahun 2020-2025.....	12
Tabel I. 3 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025	13
Tabel I. 4 Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025.....	15
Tabel II. 1 Pengukuran Kinerja Balai Transportasi Darat Kelas II Lampung Tahun 2025	21
Tabel II. 2 Layanan Angkutan Jalan Perintis Tahun 2025.....	23
Tabel II. 3 Data Produksi Terminal Tipe-A	28
Tabel II. 4 Pelabuhan yang dikelola BPTD Kelas II Lampung	31
Tabel II. 5 Perhitungan Realisasi Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan	50
Tabel II. 6 Perhitungan Realisasi Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat.....	55
Tabel II. 7 Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2025	57
Tabel II. 8 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2025	57
Tabel II. 9 Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu per Triwulan I TA. 2025.....	57
Tabel II. 10 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu per Triwulan I TA. 2025.....	57
Tabel II. 11 Rincian Revisi Per Sumber Dana T.A. 2025	58
Tabel II. 12 Rincian Revisi per Jenis Belanja T.A. 2025	58
Tabel II. 13 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja T.A. 2025....	59
Tabel II. 14 Rincian Program – Program Kegiatan DIPA T.A. 2025	59
Tabel II. 15 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 – Tahun 2025	61
Tabel II. 16 Kegiatan Program yang ada dalam DIPA	63
Tabel II. 17 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan I 2025	64
Tabel II. 18 Realisasi Anggaran Per Jenis Sumber Dana Triwulan I 2025.....	65
Tabel II. 19 Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2025.....	66
Tabel II. 20 Sisa Anggaran Per Sumber Dana Triwulan I Tahun 2025.....	66
Tabel II. 21 Efisiensi Anggaran.....	68
Tabel II. 22 Jumlah Pegawai BPTD Kelas II Lampung	69
Tabel II. 23 Perbandingan Jumlah Kebutuhan dan Jumlah Eksisting SDM.....	70
Tabel III. 1 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Grafik Capaian IKK Presentase Pelaksanaan Keperintisan	24
Gambar II. 2 Grafik Capaian IKK Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi	27
Gambar II. 3 Grafik Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Tahun 2025	30
Gambar II. 4 Grafik Capaian IKK Jumlah Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	34
Gambar II. 5 Capaian IKK Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal.....	38
Gambar II. 6 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan.	41
Gambar II. 7 Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.....	44
Gambar II. 8 Capaian IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat...	47
Gambar II. 9 Capaian IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	53
Gambar II. 10 Grafik Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 – Tahun 2025.....	62
Gambar II. 11 Realisasi Penyerapan Pagu Anggaran Triwulan I Tahun 2025	65

DAFTAR LAMPIRAN

1. **Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025;**
2. **Perjanjian Kinerja Tahun 2025;**
3. **Rencana Aksi Tahun 2025;**
4. **Monitoring Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2025;**
5. **Lain – lain yang dianggap perlu.**



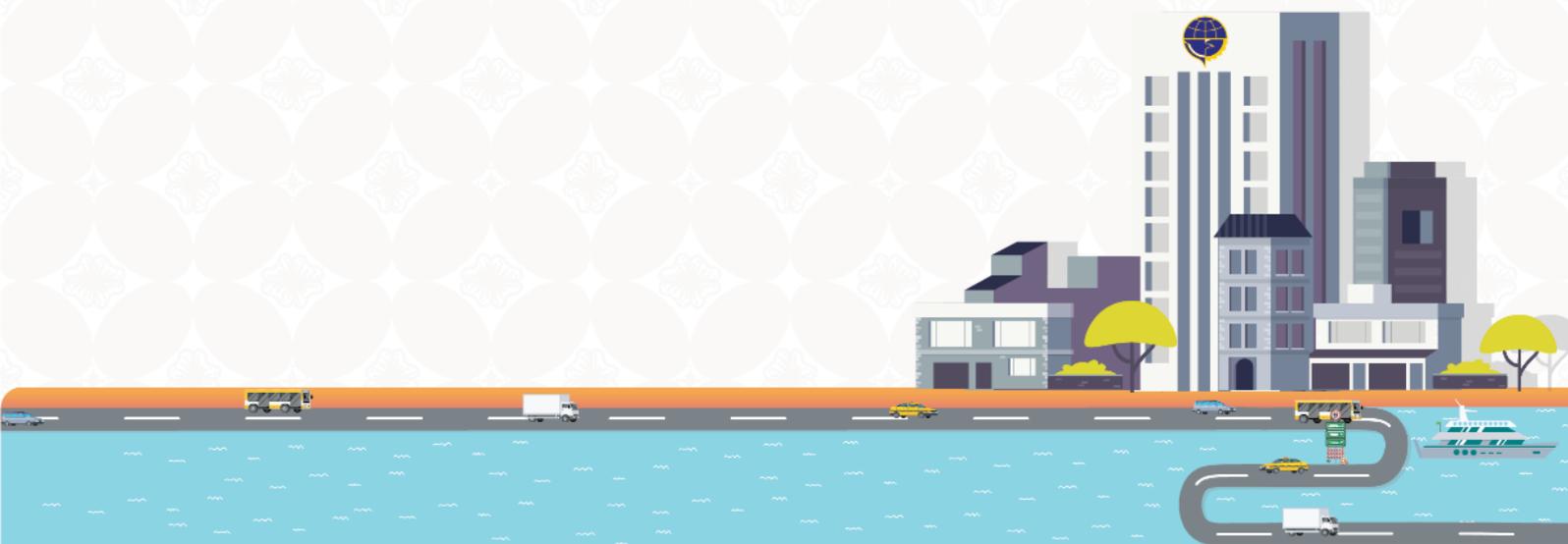
B A B I

P E N D A H U L U A N

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung dituntut untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan dengan *Prudent*, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien sesuai dengan prinsip - prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga itu diperlukan Akuntabilitas Publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraanya.



I.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dibentuk pada bulan Juli tahun 2017 berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, disebut BPTD merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung berdasarkan klasifikasinya termasuk kelas Tipe A yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai danau dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

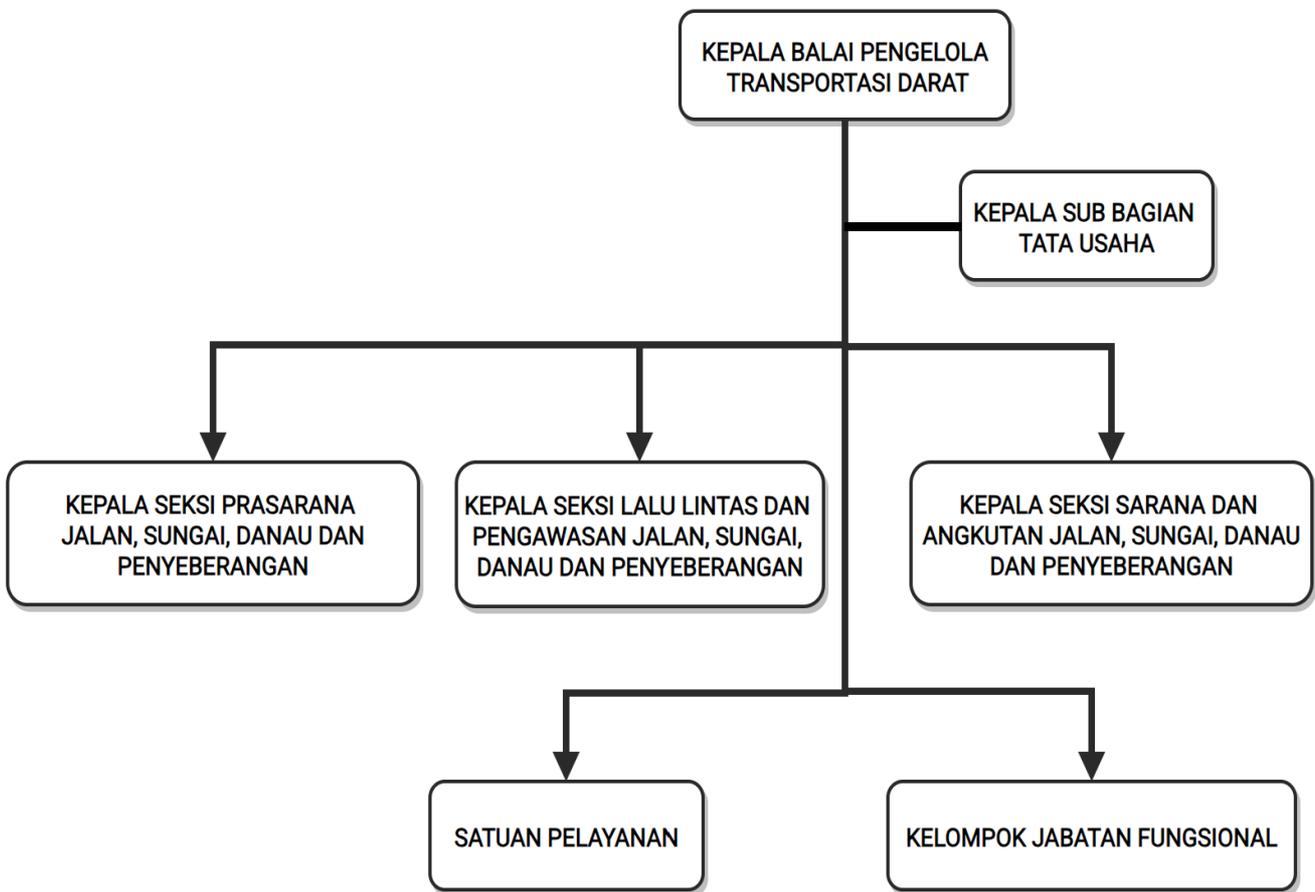
Dalam melaksanakan tugas, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
2. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri ;
3. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan ;
4. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai danau dan penyeberangan yang komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjamin keamanan dan ketertiban penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai danau dan penyeberangan yang

diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;

- 5. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
- 6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

I.2.1 Bagan Struktur Organisasi



a) Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan rencana, program, dan anggaran, urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan. Tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja, pengelolaan urusan keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta pelaporan Sistem Akuntansi Instansi, urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

b) Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan mempunyai melaksanakan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengoperasian terminal tipe A, terminal barang untuk umum, dan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis fasilitas pendukung dan integrasi moda dan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.

c) Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala dan pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor, pemeriksaan dan sertifikasi kelaiklautan kapal, analisis trayek angkutan jalan antar kota antar provinsi dan angkutan jalan yang disubsidi oleh pemerintah pusat, penetapan jadwal operasi, pemberian subsidi angkutan jalan dan pelayaran perintis sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis penyediaan sarana jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.

d) Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan

Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan untuk jaringan jalan nasional, penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau, sarana bantu navigasi pelayaran, dan sistem informasi manajemen lalu lintas sungai, danau, dan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai dan danau, pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non-tol, pemberian bantuan teknis perlengkapan jalan, halte, dan rambu sungai danau, pengamatan dan pemantauan perusahaan angkutan jalan, kegiatan karoseri, penyelenggara pengujian berkala kendaraan bermotor, pelabuhan dan penyelenggara pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersil, operator kapal sungai, danau, dan penyeberangan, kendaraan bermotor di jalan, tarif angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, pemberian subsidi angkutan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemenuhan perlengkapan jalan, persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas, pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan, pemenuhan kelaiklautan kapal sungai, danau, dan penyeberangan, ketepatan waktu pelayanan, dan pemberian subsidi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, sarana bantu navigasi pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, rambu, alur, dan halte sungai danau, kegiatan pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai danau, dan pemanfaatan bantuan teknis, pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran pada pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan,



sungai, danau, dan penyeberangan, serta patroli dan pengamanan pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

e) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan Pelayanan yang ada di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung meliputi :

1. Satuan pelayanan Terminal Penumpang Tipe A Rajabasa
2. Satuan pelayanan Terminal Penumpang Tipe A Betan Subing
3. Satuan pelayanan UPPKB Way Urang
4. Satuan pelayanan UPPKB Simpang Pematang
5. Satuan pelayanan UPPKB Blambangan Umpu
6. Satuan pelayanan Pelabuhan Wiralaga
7. Satuan pelayanan Pelabuhan Danau Lumbok

I.3 Sumber Daya Manusia

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung menaungi sebanyak 296 Pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai BPTD Kelas II Lampung

NO.	KETERANGAN	ASN	PPNP	TOTAL
1	KANTOR INDUK	94	51	145
2	UPPKB WAY URANG	30	24	54
3	TERMINAL RAJABASA	37	35	72
4	TERMINAL BETAN SUBING	5	14	19
5	UPPKB BLAMBANGAN UMPU	-	2	2
6	UPPKB SIMPANG PEMATANG	-	1	1
	TOTAL		293	



I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung memetakan potensi, Isu strategis dan permasalahan yang akan dihadapi.

1.4.1 Potensi yang dimiliki oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung, adalah sebagai berikut:

1. Wilayah kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung yang meliputi Seluruh Provinsi Lampung yang terdiri dari 15 (lima belas) Kabupaten/Kota;
2. Dengan adanya sebagian pelimpahan kewenangan pusat ke Balai yang memotong jarak dan waktu birokrasi tentunya akan memungkinkan meningkatnya peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan dana investasi yang dibutuhkan bagi pembangunan infrastruktur transportasi darat. Meningkatnya peran serta swasta dan masyarakat dalam pengembangan pelayanan transportasi darat akan memperluas jangkauan pelayanan dengan kualitas pelayanan yang makin baik;
3. Fasilitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi darat yang terdiri dari 2 (dua) terminal tipe A, 3 (tiga) pelabuhan dan penyeberangan dan 3 (tiga) Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang tersebar di wilayah Provinsi Lampung;
4. Adanya penambahan sumber daya manusia pada tahun 2025, yang ditempatkan tersebar di satuan pelayanan maupun seksi teknis dan Subbag Tata Usaha;
5. Perkembangan teknologi baik peralatan dan informasi beserta personil yang memiliki kemampuan menggunakan teknologi tersebut yang memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan mulai tahap perencanaan, pembangunan serta pemeliharaan;
6. Kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah yang dalam hal ini adalah Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung dan Dinas Perhubungan se-Provinsi Lampung.

1.4.2 Sumber Daya Manusia

Pembentukan Balai Pengelola Transportasi Darat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 20 Tahun 2018, perlu didukung oleh penambahan jumlah pegawai dalam rangka pelaksanaan tupoksi dikarenakan masih terdapat BPTD yang memiliki satuan pelayanan belum berfungsi secara optimal.

1.4.3 Isu Strategis

Isu Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah:

1. PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
2. Pengoperasian Jembatan Timbang (UPPKB);
3. Pengoperasian Terminal Penumpang;



4. Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Penyeberangan;
5. Penataan dan pembinaan SDM transportasi darat;
6. Perubahan *Mindset* dan *Cultureset* masyarakat, operator terkait prioritas angkutan jalan dan angkutan umum;
7. ODOL (*Over Dimension Over Loading*);
8. Perencanaan anggaran dan proses pengadaan;
9. Uji berkala kendaraan bermotor oleh pemerintah dan swasta.

1.4.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung Tahun 2025 adalah:

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja
3. Indikator Kinerja Program
4. Pengukuran Kinerja
5. Evaluasi Kinerja

1.4.5 Pemasalahan

Permasalahan yang dihadapi Balai Pengelola Transportasi Darat meliputi :

1. Rendahnya kondisi pelayanan prasarana jalan menyebabkan kerusakan di jalan akibat pelanggaran muatan lebih di jalan yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi, hal ini disebabkan Pengawasan melalui jembatan timbang belum optimal Karena keterbatasan fisik/peralatan SDM dan sistem manajemen.
2. Belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan, antarkota, perkotaan dan pedesaan.
3. Masih terdapatnya ruas jalan nasional yang belum optimal dilengkapi fasilitas perlengkapan jalan.
4. Tidak optimalnya penggunaan simpul transportasi sebagai integrasi antar moda angkutan
5. Masih adanya perusahaan karoseri di Provinsi Lampung yang belum memiliki SKRB
6. Masih adanya daerah yang belum memiliki peralatan pengujian kendaraan bermotor.
7. Kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan angkutan umum yang masih terbatas, walaupun setiap tahun terjadi peningkatan izin trayek angkutan umum (izin trayek angkutan bus antar kota antar provinsi), namun tingkat kelaikan armada umumnya masih rendah;
8. Masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan akibat disiplin pengguna jalan;
9. Rendahnya *law enforcement* peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas, Masalah pendidikan dan *law enforcement* peraturan yang belum efektif dilihat dari tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas di jalan. Pelanggaran lalu lintas dibedakan menjadi pelanggaran muatan dan/ atau dimensi, pelanggaran perizinan angkutan orang dan/ atau barang, pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran kelengkapan dokumen,



pelanggaran rambu. Masalah disiplin berlalu lintas juga merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas;

10. Masalah keterjangkauan dan pemerataan pelayanan transportasi jalan;
11. Kendala transportasi wilayah perbatasan yang disebabkan karena minim infrastruktur, tingginya ketidakpastian atau ketidakteraturan jadwal, mahalnya biaya perjalanan terutama pada wilayah perbatasan, rawan kecelakaan, tidak bersinerginya kebijakan dan implementasi.
12. Belum adanya data yang lengkap mengenai peta alur pelayaran sungai danau;
13. Masih belum tersusunnya data sarana prasarana transportasi penyeberangan;
14. Ketersediaan data trayek transportasi SDP di beberapa daerah belum tersimpan dengan baik;
15. Belum dilaksanakannya penetapan kelas alur-pelayaran sungai dan danau sebagai batas wilayah administrasi dan pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/kota;
16. Belum adanya buku petunjuk-pelayaran sungai dan danau
17. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi-instansi lain terkait dengan masalah keselamatan;
18. Belum lengkapnya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan keselamatan jalan;
19. Bidang keselamatan jalan belum mendapatkan perhatian yang lebih oleh pemerintah daerah sehingga program-program peningkatan keselamatan jalan belum berjalan dengan maksimal.

I. 4. Sistematika Laporan

Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Tugas Pokok dan Fungsi
 - **Bagan Struktur Organisasi**
- I.3 Sumber Daya Manusia
- I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- I.5 Sistematika Laporan
- I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis
 - I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025
- I.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

- II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja
- II.2 Pengukuran Capaian Kinerja



II.2.1 SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

• Uraian Sasaran Program

II.2.1.1 IKK1.1 Presentase pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.1.2 IKK1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.1.3 IKK1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.2 SK2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat

• Uraian Sasaran Program

II.2.2.1 IKK2.3 Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.3 SK3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

• Uraian Sasaran Program

II.2.3.1 IKK3.1 Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.3.2 IKK2.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.3.3 IKK2.7a Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang



II.2.4 SK4 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

- **Uraian Sasaran Program**

II.2.4.1 IKK5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.5 SK5 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Pehubungan Darat Akuntabel

- **Uraian Sasaran Program**

II.2.5.1 IKK6.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran DITJEN Perhubungan Darat

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3 Realisasi Anggaran

II.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2025

- Pagu Anggaran
- Rincian Per Sumber Dana Tahun 2025
- Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2025
- Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran
- *Refocusing* Anggaran Tahun 2025
- Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2025
- Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2025
- Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2025
- Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025
- Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2017 - 2025

II.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2025

- Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025
- Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025
- Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025
- Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

II.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

II.3.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

II.3.5. Hambatan dan Kendala

BAB III PENUTUP

III.1 Penutup

IV.1.1 Ringkasan Capaian

III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Lampiran

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
3. Rencana Aksi Tahun 2025;
4. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2025;
5. Lain – lain yang dianggap perlu

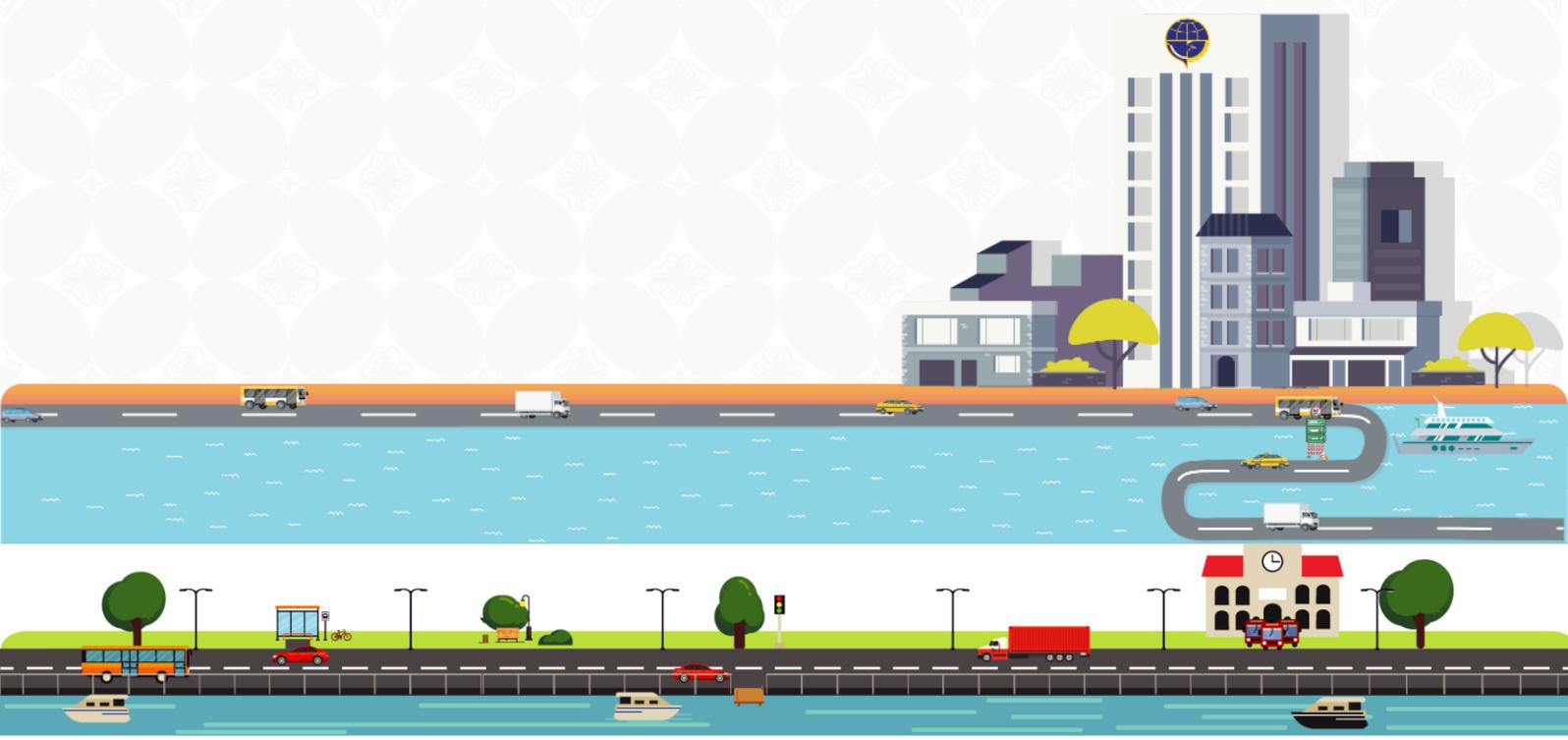


I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung Tahun 2020 - 2025 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung dalam kurun waktu 2020 - 2025 sebagai masukan dalam penyusunan Draft Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 - 2025 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja program Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Draft Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 - 2025, sebagaimana tabel berikut ini:



Tabel I. 2 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung sesuai Draft Rencana Strategi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung Tahun 2020-2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	BASELINE 2019	2020	2021	2025	2025	2025
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%		100	100	100	100	100
		IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi						
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	2	2	2	2	3
		IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi						
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%						
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	1	2	2	3	3	4
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%						
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%		0	0	0	0	30
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%		80	80	80	80	80
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	50	80	80	80	80	80
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	99,7					
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi		13	1	0	21	20
		IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi						
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang		-	2000	1000	1000	1000
		IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UNECE)*	unit						

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	BASELINE 2019	2020	2021	2025	2025	2025
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	30	74,8	74,8	74,8	74,8	74,8
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi						
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	70	80	80	80	80	80
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	70	80	83,9	83,96	83,98	84

I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung adalah kontrak kinerja antara Balai Pengelolaan Transportasi Darat Kelas II Lampung dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2025 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Balai Pengelolaan Transportasi Darat Kelas II Lampung melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat adalah sebagai berikut:

Tabel I. 3 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2025
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK1.1	Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100
			IKK1.3	Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi	Lokasi	2
			IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	Lokasi	6
2	SK2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK2.3	Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	80



No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2025
3	SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1	Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	80
			IKK3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	1000
			IKK7a	Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Motor	%	74,8
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	80
5	SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	84

I.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung merupakan kontrak kinerja antara Balai Pengelolaan Transportasi Darat Kelas II Lampung dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2025 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Balai Pengelolaan Transportasi Darat Kelas II Lampung melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp 73.161.321.000,- adalah sebagai berikut:



Tabel I. 4 Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target 2025	
1	SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK1.1	Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100
		IKK1.3	Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi	Lokasi	2
		IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	Lokasi	6
2	SK2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK2.3	Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	80
3	SK3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1	Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	80
		IKK3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	1000
		IKK7a	Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Motor	%	74,8
4	SK4 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	80
5	SK5 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK5.2	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	84

No.	KEGIATAN	ANGGARAN	
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	3.461.080.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	3.858.737.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	23.521.035.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	5.417.212.000
5.	Pengelola Organisasi dan SDM	Rp.	7.804.055.000
6.	Pengelola Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp.	29.099.200.000





BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

II.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah yang dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misinya.

Mekanisme pengelolaan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung melalui aplikasi *E-performance* dimulai dari target-target yang telah ditetapkan dalam PK yang kemudian dilakukan pengukuran dan pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berkala melalui aplikasi *E-performance* yang berbasis web. Pelaksanaan pengelolaan pengukuran kinerja dilakukan sepanjang tahun yang meliputi proses penginputan, validasi, dan pelaporan secara berkala setiap awal bulan. Proses dan kegiatan tersebut dilakukan secara bersama sama antara pengelola data dan laporan kinerja di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung.



II. 2. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web e-Performance yang menyediakan fasilitas *inputing*, *updating* dan *monitoring* pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan *reward* atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung dimasa mendatang.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Prosentase. Adapun rumus yang



digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

Prosentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung Tahun 2025

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025;
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2025 Dalam Draft Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung Tahun 2020-2025.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri



Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan. Untuk mewujudkan 5 (lima) tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Draft Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung 2020-2025, bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2020-2025.



Tabel II. 1 Pengukuran Kinerja Balai Transportasi Darat Kelas II Lampung Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			SATUAN	TARGET	TRIWULAN I		
					T	R	C
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SK1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi							100%
IKK 1.1	Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan		%	100	100	100	100%
IKK 1.3	Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi		Lokasi	2	2	2	100%
IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi		Lokasi	6	6	6	100%
SK 2 Meningkatkan Pelayanan Transportasi Darat							100%
IKK 2.3	Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP		%	80	80	80	100%
SK3 Meningkatkan Keselamatan Transportasi							33%
IKK 3.1	Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal		%	80	80	0	0%
IKK 3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan		Orang	1000	1000	0	0%
IKK 3.7	Presentase Standarisasi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor		%	74,8	74,8	74,8	100%
SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat							100%
IKK 6.1	Kualiatas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat		Nilai	80	80	80	100%
SK6 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel							100%
IKK 7.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat		Nilai	84	84	84	100%
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Program							86%
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Program							77
Jumlah Indikator Kinerja Program yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKP≥100%)							7
Jumlah Indikator Kinerja Program kurang dari 100% (0%≤IKP<100%)							2



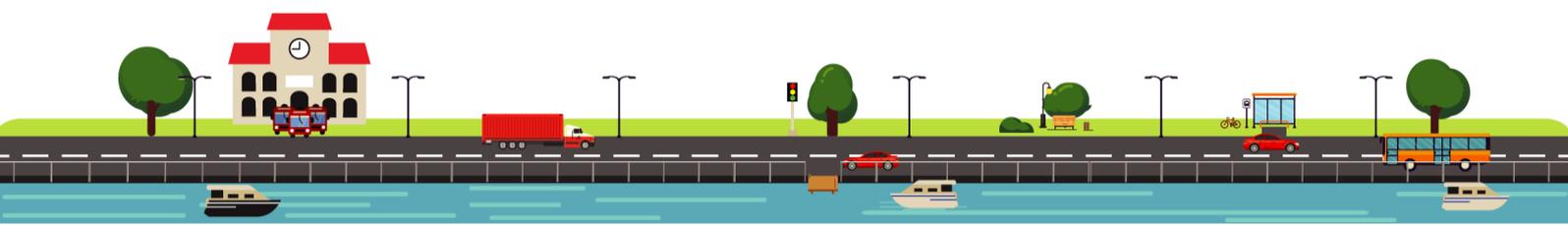
Selama tahun 2025, ada 5 Sasaran Kegiatan (SK) dan di dalamnya ada 9 IKK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung. Penjelasan capaian IKK untuk setiap Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut:

II.2.1 Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung merupakan salah satu balai di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Draft Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung Tahun 2020-2025. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 6 (Enam) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

- IKK 1.1 Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan
- IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi
- IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi



II.2.1 IKK 1 Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Angkutan Jalan Perintis adalah angkutan orang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum yang menghubungkan wilayah tertentu yang tidak tersedia atau belum cukup tersedia moda transportasi darat. Adapun keperintisan angkutan jalan nasional yang dimaksud adalah penyelenggaraan penyediaan layanan angkutan umum DAMRI pada sejumlah trayek di wilayah daerah Lampung yang belum terdapat pelayanan angkutan umum disana. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mendukung kegiatan perekonomian warga pada trayek yang dilayani. Adapun data trayek yang dilayani pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel II.2.

Tabel II. 2 Layanan Angkutan Jalan Perintis Tahun 2025

No	Lintasan	Jumlah Rit/Tahun	Jarak (Km)	Total Realisasi (Trip)	Persen tase
1	Liwa - Kebon Tebu	310	182	88	28,38
2	Panaragan - Negara Batin	365	104	143	39,17
3	Pringsewu – Adiluwih - Tegineneng	310	102	88	28,38
4	Liwa - Way Batu – Ratu Agung	365	178	140	38,35

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel II.2, dapat diketahui bahwa untuk Tahun Anggaran 2025, terdapat 4 trayek yang dilayani pada Perum DAMRI yang ada di Lampung.

a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung Tahun 2025

Capaian kinerja Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2025 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target Revisi II PK 2025 sebesar 100 % maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.1** Grafik Capaian IKK Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan.





Gambar II. 1 Grafik Capaian IKK Presentase Pelaksanaan Keperintisan

Berikut ini rincian capaian setiap triwulan untuk Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan BPTD Kelas II Lampung tahun 2025.

a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

• Dasar Hukum

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 3385 Tahun 2021 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2022, menetapkan jaringan trayek angkutan jalan perintis tahun 2022 di 32 (tiga puluh dua) Provinsi di Indonesia dengan jumlah trayek sebanyak 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) trayek.

• Kronologi target pada Perjanjian Kinerja

Dari jumlah trayek dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 3385 Tahun 2022 sebanyak 338 diantaranya terdapat 7 (tujuh) trayek di Provinsi Lampung sebagaimana berikut:

1. Liwa - Kebon Tebu
2. PS Panarangan Jaya - Negara Batin
3. Pringsewu - Adiluwih – Tegineneng
4. Liwa - Way Batu - Rata Agung

• Faktor keberhasilan

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan jaringan trayek angkutan jalan perintis antara lain:



1. Adanya dukungan penuh dari Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penyelenggaraan angkutan perintis;
2. Kolaborasi yang baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemda terkait usulan trayek, pengawasan dan pelaporan;
3. Perencanaan yang matang dalam menentukan trayek yang akan dilayani oleh angkutan perintis tersebut;
4. Minat masyarakat yang tinggi terhadap keberadaan angkutan perintis tersebut.

- **Faktor kegagalan atau Potensi Kegagalan**

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pelaksanaan jaringan trayek angkutan jalan perintis antara lain:

1. Load Factor yang rendah;
2. Makin maraknya pengelolaan kendaraan komersil dengan kemudahan aksesnya;
3. Sebagian besar akses jalan menuju daerah yang dijangkau oleh angkutan perintis ini masih rusak dan sulit ditempuh;
4. Faktor cuaca maupun kondisi geografis dari daerah yang dijangkau angkutan perintis.

- **Perhitungan Realisasi Kinerja**

Untuk menghitung Realisasi Kinerja Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2025 digunakan rumus sebagai berikut:

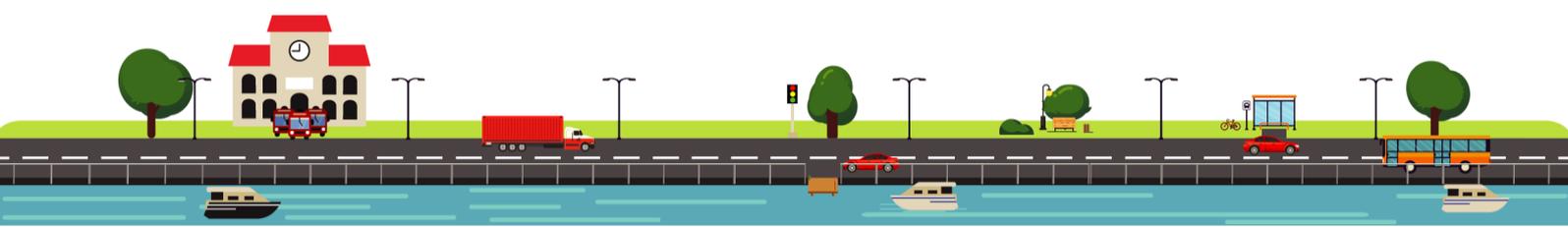
Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan =

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Persentase Trayek Angkutan Perintis di Jalan}}{\text{Persentase Trayek Angkutan Perintis yang direncanakan}}$$

- **Perhitungan Capaian Kinerja**

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$



- **Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan**

Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2025. Pagu Anggaran Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan senilai Rp. 3.461.080.000 dengan realisasi Tahun 2025 Rp. 371.439.000 atau mencapai 11% dan nomor nomenklatur POK : 4637.QAH.001

a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

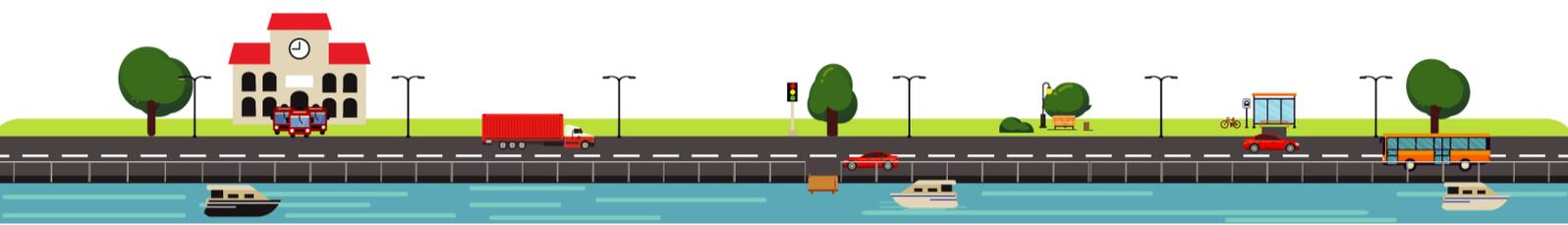
1. Menyediakan atau memberikan subsidi untuk pelayanan angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah-daerah tersebut.
2. Melakukan Kajian/Survey Ulang kebutuhan masyarakat terkait rute perintis yang dilalui masyarakat
3. Mengusulkan rute layanan perintis ke Dirjen Angkutan.

II.2.1.2 IKK 3. Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Adapun untuk wilayah kerja BPTD Lampung, telah beroperasi Terminal Penumpang Tipe-A saat ini. Terminal Penumpang Tipe-A berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP), Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP), Angkutan Antar Kota (Angkot), dan Angkutan Pedesaan (Angdes). Selanjutnya maksud dari IKK ini adalah untuk mengetahui berapa jumlah terminal yang telah beroperasi di bawah naungan BPTD Lampung pada tahun 2025.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung Tahun 2025



Capaian kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi Tahun 2025 sebesar 2 jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 2 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.3** Grafik Capaian IKK Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi.



Gambar II. 2 Grafik Capaian IKK Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi

Berikut ini rincian capain setiap triwulan untuk Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi BPTD Kelas II Lampung tahun 2025.

a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 perubahan atas PM 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, terhadap Operasional Pelayanan Terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi pada tahun 2023 di 2 Terminal tipe-A Provinsi Lampung dengan rincian sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggungjawab seluruh staf Terminal Tipe-A;
2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM;
3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggungjawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di



Terminal Tipe-A.

- **Kronologi target pada Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, indikator Kinerja Kegiatan jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi terhadap konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 2 Lokasi yang berdasarkan pada target Renstra BPTD Kelas II Lampung tahun 2020-2025 sebesar 2 lokasi. Berdasarkan data produksi 2 terminal yang di kelola BPTD Kelas II Lampung sampai bulan Maret Tahun 2025 masih banyak bus yang tidak masuk ke terminal, dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada pihak organda sehingga masih banyak pool yang masih beroperasi di luar terminal. Berikut merupakan rekap data produksi teminal yang dikelola BPTD Kelas II Lampung sampai dengan triwulan I:

Tabel II. 3 Data Produksi Terminal Tipe-A

No	Terminal Tipe A	Keberangkatan		Kedatangan	
		Penumpang	Kendaraan	Penumpang	Kendaraan
1	Rajabasa	6.667	49.359	38.712	5.608

- **Faktor Keberhasilan**

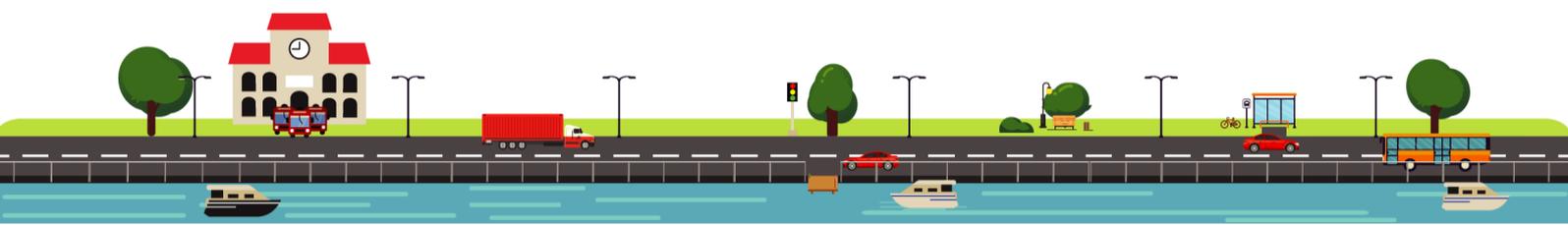
Keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi tahun 2025 antara lain yaitu:

1. Tingginya antusias masyarakat menggunakan angkutan umum;
2. Informasi tentang pelayanan di terminal tersampaikan kepada masyarakat;
3. Banyak masyarakat yang menggunakan terminal sebagai tempat perpindahan koridor.

- **Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan**

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pelaksanaan jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi ini antara lain:

1. Kebersihan di terminal masih kurang maksimal;
2. Lokasi jauh dari jalan utama;
3. Fasilitas umum di terminal masih kurang memadai bagi pengguna layanan;
4. Kurangnya minat masyarakat terhadap penggunaan angkutan umum



yang telah di sediakan.

- **Perhitungan Realisasi Kinerja**

Untuk menghitung Realisasi Kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi Tahun 2025 digunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi}}{\text{Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang di Rencanakan Beroperasi}}$$

- **Perhitungan Capaian Kinerja**

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

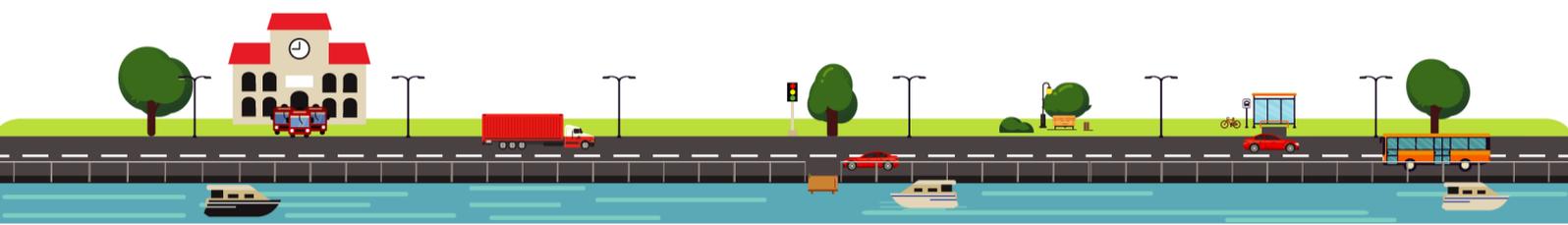
- **Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan**

Adapun Pagu Anggaran terkait capaian Indikator Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi Tahun 2025 yaitu senilai Rp. 2,680,079,000,- dengan realisasi Tahun 2025 Rp. 213,978,854,- atau mencapai 8% dan Nomor Nomenklatur 4638.CDP.040.051

a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Mengusulkan ke depannya untuk mengoperasionalkan seluruh terminal yang berada di wilayah kerja BPTD Kelas II Lampung demi memberikan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan fasilitas prasarana transportasi umum yang lebih baik dan nyaman
2. Menyediakan ruang tunggu dan tempat makan yang lebih baik bagi penumpang melalui usulan kegiatan di tahun – tahun berikutnya
3. Menyediakan ruang parkir bagi kendaraan penumpang untuk mendukung sistem Transit Oriented Development (TOD)
4. Melakukan Monitoring Terminal Tipe-A sesuai dengan jadwal yang telah disusun



II.2.1.3 IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi

a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan. Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan penyeberangan kelas I, kelas II, dan kelas III. Sedangkan, pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan pengumpul dan pengumpan. Pelabuhan SDP yang beroperasi merupakan Pelabuhan SDP yang dibangun melalui APBN. BPTD Kelas II Lampung memiliki Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan SDP yang memiliki fungsi melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Pelabuhan Penyeberangan terhadap keselamatan transportasi angkutan umum di darat berjalan dengan benar serta mengevaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM.

a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung Tahun 2025

Capaian kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Tahun 2025 sebesar 6 jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 6 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.3** Grafik Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Tahun 2025.



Gambar II. 3 Grafik Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Tahun 2025



Berikut ini rincian capaian setiap triwulan untuk Pelabuhan SDP yang Beroperasi Tahun 2025 BPTD Kelas II Lampung tahun 2025.

a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

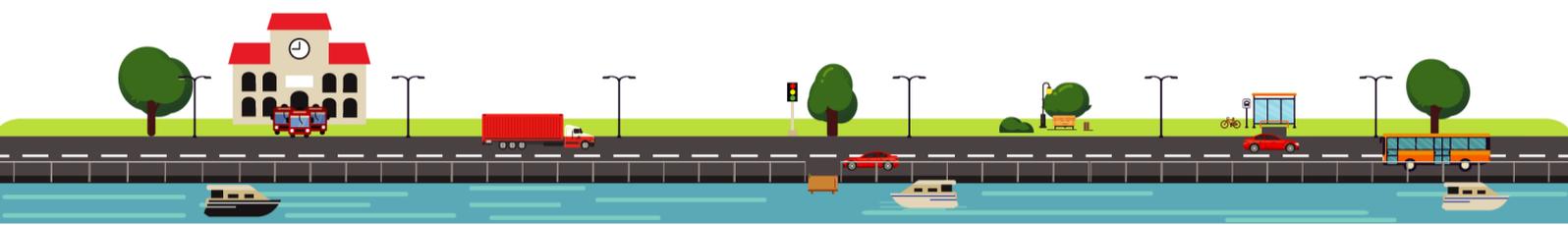
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. POK BPTD Kelas II Lampung Tahun 2025.

Tabel II. 4 Pelabuhan yang dikelola BPTD Kelas II Lampung

No	Pelabuhan Penyeberangan	Dasar Hukum
1	Pelabuhan Sungai Wiralaga	PM 6 Tahun 2023
2	Pelabuhan Danau Lumbok	PM 6 Tahun 2023
3	Operasional Pelabuhan Penyeberangan KTM Sp. 8 (PEMDA)	POK BPTD LAMPUNG
4	Pelabuhan Penyeberangan Kuala Teladas (PEMDA)	POK BPTD LAMPUNG
5	Pelabuhan Heniarong	POK BPTD LAMPUNG
6	Pelabuhan Danau Ranau	POK BPTD LAMPUNG

- **Kronologi target pada Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi terhadap konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 3 terhadap PK di awal tahun dengan berdasarkan arahan pimpinan sesuai dengan DIPA 2025 pelabuhan yang sedang terbangun. Namun pada tahun berjalan dikeluarkan Instruksi Menteri No. 9 sehingga Operasional Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni dilaksanakan oleh KSOP Kelas IV Bakauheni. Dilakukan kesepakatan bersama bahwa jumlah Pelabuhan yang beroperasi sesuai dengan POK masing-masing balai, sehingga ada perubahan target menjadi 6 pelabuhan.



- **Faktor keberhasilan**

Keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi antara lain dipengaruhi oleh:

1. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelabuhan sesuai ketentuan atau undang-undang yang berlaku;
2. Terpenuhinya Fasilitas Pendukung Pelayanan Pelabuhan;
3. Terpenuhinya Sumber Daya Manusia yang Cakap, Handal dan Sinergitas.

- **Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan**

Faktor kegagalan atau potensi kegagalan sehingga tidak tercapainya pelaksanaan Pelabuhan SDP yang beroperasi antara lain dipengaruhi oleh:

1. Tidak Layak Sarana dan Prasarana Pelabuhan sehingga pelayanan kurang maksimal;
2. Minimnya Fasilitas Pendukung di Pelabuhan;
3. Kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- **Perhitungan Realisasi Kinerja**

Untuk menghitung Realisasi Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi Tahun 2025 digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK\ 1.6 = \text{Jumlah Pelabuhan SDP yang telah selesai dibangun dan dioperasikan} \\ = 7$$

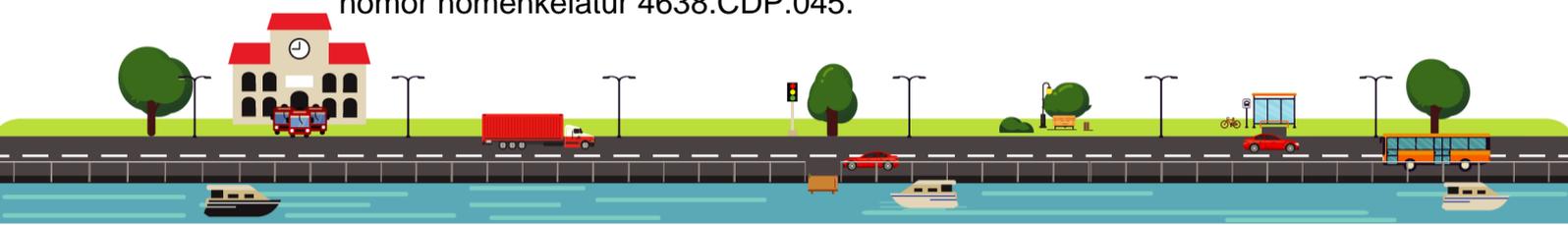
- **Perhitungan Capaian Kinerja**

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$$

- **Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan**

Adapun anggaran terkait capaian Indikator Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi Tahun 2025 Pagu Anggaran Sebesar Rp. Rp 678,660,000,- dengan realisasi Tahun 2025 Rp. Rp 12.420.000- atau mencapai 2 % dan nomor nomenkelatur 4638.CDP.045.



a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Mengusulkan ke depannya untuk mengoperasionalkan seluruh pelabuhan dan dermaga yang berada di wilayah kerja BPTD Kelas II Lampung demi memberikan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan fasilitas prasarana transportasi umum yang lebih baik dan nyaman;
2. Menyediakan ruang tunggu dan tempat makan yang lebih baik bagi penumpang melalui usulan kegiatan di tahun – tahun berikutnya;
3. Menyediakan ruang parkir bagi kendaraan penumpang untuk mendukung sistem Transit Oriented Development (TOD);
4. Melakukan Monitoring Pelabuhan SDP yang beroperasi sesuai dengan jadwal yang telah disusun.

II.2.2 Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat

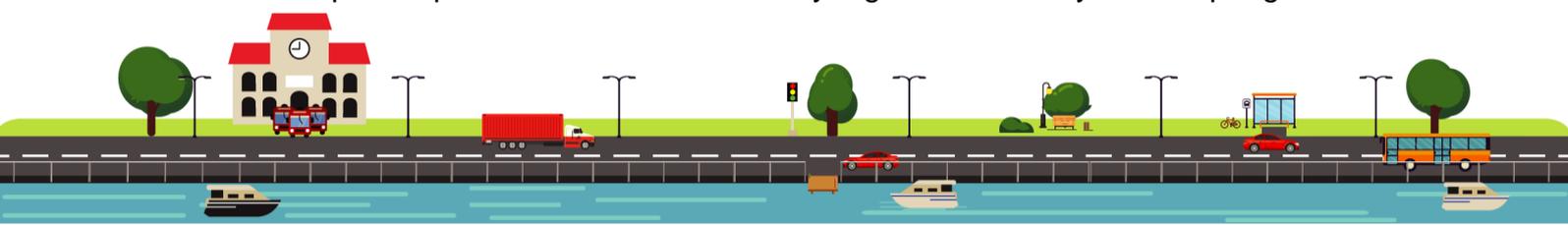
Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kinerja (IKK) yaitu:

1. IKK 3. Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

II.2.2.1 IKK2.3 Jumlah Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelabuhan Penyeberangan sebagai tempat pelayanan jasa angkutan penyeberangan, wajib juga memenuhi SPM yang telah ditentukan dalam ketentuan perundangan yang berlaku guna memastikan kenyamanan dan keamanan pengguna jasa. Adapun Lampung sebagai pengawas pemenuhan SPM di Pelabuhan SDP juga bersinergi dengan para operator Pelabuhan SDP yang ada di wilayah Lampung untuk



memeriksa dan mengevaluasi pemenuhan SPM pada pelabuhan-pelabuhan SDP yang ada di wilayah Lampung tersebut.

a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung Tahun 2025

Capaian kinerja Jumlah Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP tahun 2025 sebesar 80 jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 80 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.4** Grafik Capaian IKK Jumlah Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP.



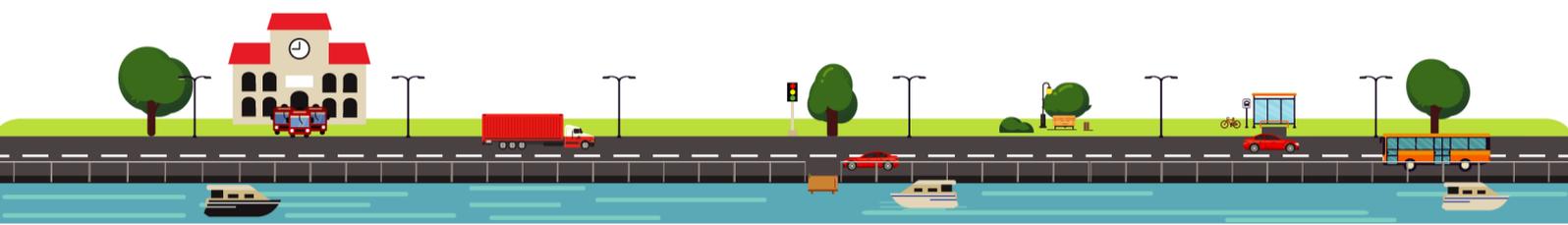
Gambar II. 4 Grafik Capaian IKK Jumlah Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

Berikut ini rincian capaian setiap triwulan untuk Pelabuhan SDP yang Beroperasi Tahun 2025 BPTD Kelas II Lampung tahun 2025.

a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP bisandipedomani melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan.



- **Kronologi target pada Perjanjian Kinerja**

Target persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP dalam Renstra BPTD Kelas II Lampung Tahun 2020-2025 sebesar 80%, sesuai dengan arahan pimpinan untuk target dalam PK BPTD Kelas II Sumatera Utara tahun 2025 terkait persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP untuk meningkatkan pelayanan transportasi darat dibuat sama sebesar 80% supaya dalam pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP diharapkan semakin optimal.

- **Faktor Keberhasilan**

1. Komitmen pemerintah pusat dalam program pengembangan dan peningkatan pelayanan Pelabuhan SDP;
2. Pelaksanaan operasional Pelabuhan SDP sesuai Standar Operasional Prosedur Pengoperasian Pelabuhan SDP yang telah ditetapkan;
3. Memberlakukan sanksi yang tegas dan memberikan efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan penyeberangan dalam mematuhi jam pelayanan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- **Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan**

1. SDM yang kurang memadai dan berkompeten;
2. Pelaksanaan operasional Pelabuhan SDP yang belum sesuai Standar Operasional Prosedur Pengoperasian Pelabuhan SDP yang telah ditetapkan;

Masih ditemukannya kendaraan ODOL (Over Dimensi Over Load) yang menggunakan fasilitas angkutan penyeberangan, sehingga dapat membahayakan kendaraan dan pengguna jasa lain.

- **Perhitungan Realisasi Kinerja**

Untuk menghitung Indikator Jumlah Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK\ 2.3 = \frac{\text{Jumlah Pelabuhan yang memenuhi SPM}}{\text{Jumlah Pelabuhan yang dipantau}} \times 100\%$$



$$= \frac{4}{5} \times 100\% = 80$$

- **Perhitungan Capaian Kinerja**

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Jumlah Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\text{Capaian} = \frac{80}{80} \times 100\% = 100\%$$

- **Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan**

Adapun anggaran terkait capaian Indikator Jumlah Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. Rp204,558,000,- dengan realisasi Tahun 2025 Rp. 16.540.000,- atau mencapai 8% dan nomor nomenklatur 4640.FAE.923.923

a .4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

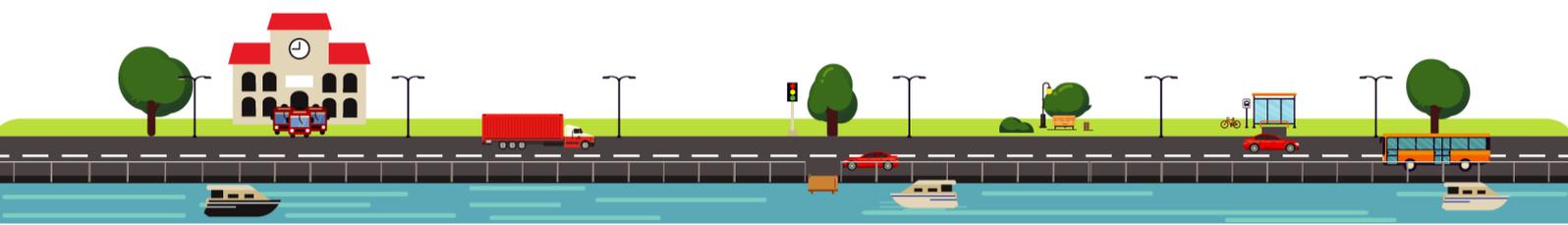
Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan standar operasional pelabuhan SDP;
2. Memberikan reward dan punishment terkait pelaksanaan standar pelayanan minimum;
3. Melakukan Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP sesuai dengan jadwal yang telah disusun.

III.2.3 Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 diukur melalui 4 (Delapan) Indikator Kinerja Kinerja (IKK) yaitu:

1. IKK 1. Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal;
2. IKK 5. Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan;
3. IKK 7. Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.



II.2.3.1 IKK3.1 Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

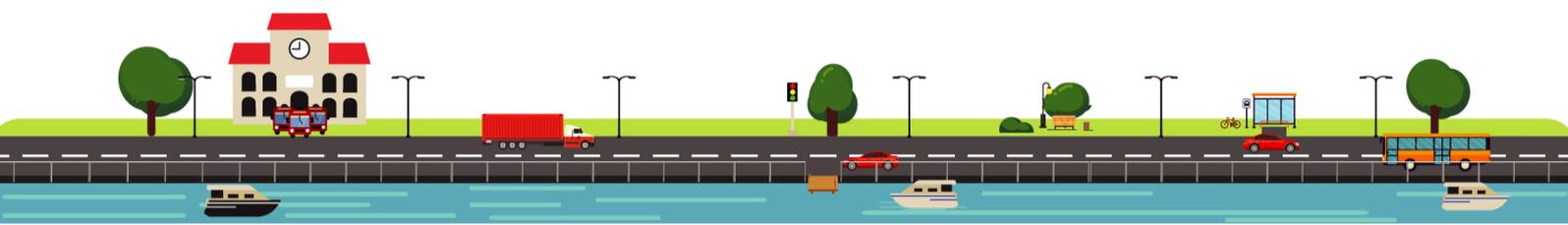
Kebutuhan perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan merupakan perhitungan dari 9 (sembilan) item perlengkapan jalan dengan satuan yang berbeda. Adapun 9 (sembilan) item dimaksud meliputi:

1. Marka Jalan;
2. Rambu Lalu Lintas;
3. Patok Lalu Lintas;
4. Paku Jalan;
5. Pagar Pengaman Jalan;
6. Alat Penerangan Jalan;
7. Lampu Peringatan Pemakai Jalan;
8. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
9. Cermin Tikungan.

a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Terhadap Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung Tahun 2025

Capaian kinerja Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Tahun 2025 sebesar 80 jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 80 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.5** Grafik Capaian IKK Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal.





Gambar II. 5 Capaian IKK Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

Berikut ini rincian capaian setiap triwulan Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Tahun 2025 BPTD Kelas II Lampung tahun 2025.

a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Perlengkapan jalan bisa dipedomani melalui Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 Tanggal 14 November 2013 Tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan.

- **Kronologi target pada Perjanjian Kinerja**

Target persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal dalam Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Lampung sesuai dengan Renstra BPTD Kelas II Lampung Tahun 2020-2025 sebesar 80%,

- **Faktor Keberhasilan**

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pemasangan perlengkapan jalan yang terpasang terhadap kondisi ideal antara lain:

1. Komitmen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemasangan perlengkapan jalan;
2. Perencanaan yang matang dalam pemasangan perlengkapan jalan;
3. Kontrak pekerjaan tepat waktu;



4. Monitoring dan evaluasi yang rutin terhadap kondisi perlengkapan jalan yang telah terpasang dan perlengkapan jalan yang dibutuhkan.

- **Faktor Kegagalan**

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pelaksanaan pemasangan perlengkapan jalan yang terpasang terhadap kondisi ideal antara lain:

1. Masih banyak perlengkapan jalan yang hilang dan rusak masyarakat tidak bertanggungjawab;
2. Perencanaan yang belum tepat terhadap pemasangan perlengkapan jalan terhadap kondisi ideal;
3. Pekerjaan tidak selesai dengan waktu yang telah ditentukan;
4. Monitoring dan evaluasi yang masih kurang terhadap kondisi perlengkapan jalan yang telah terpasang dan perlengkapan jalan yang dibutuhkan.

- **Perhitungan Realisasi Kinerja**

Untuk menghitung Indikator Kinerja Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang terhadap kondisi ideal digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK\ 3.1 = \frac{\text{Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang}}{\text{Jumlah kebutuhan perlengkapan jalan}} \times 100\%$$

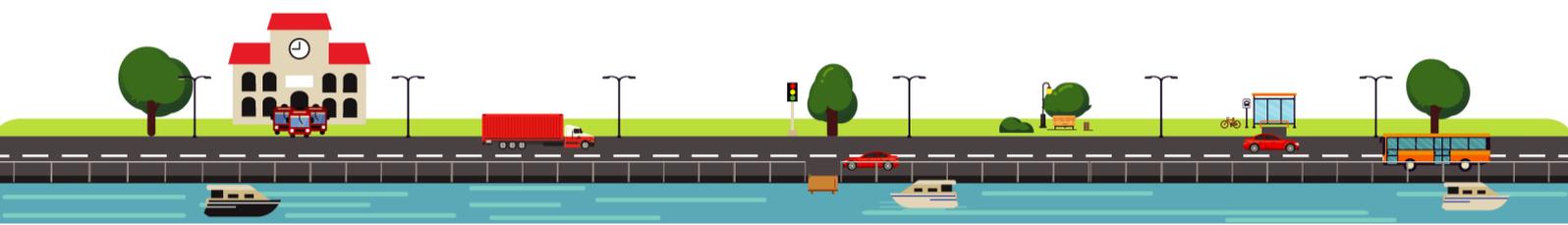
- **Perhitungan Capaian Kinerja**

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang terhadap kondisi ideal tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0}{80} \times 100\% = 0\%$$

- **Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan**

Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang kondisi ideal sebesar Rp. Rp18,644,476,000,- dengan realisasi Tahun 2025 Rp. 0,- atau mencapai 0% dan Nomor nomenklatur 4639.RAC.053, 4639.RCC.212



a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap pemasangan perlengkapan jalan, Melakukan survei terkait titik – titik pemasangan baru perlengkapan jalan;
2. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah atau instansi lain terkait perlengkapan jalan;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kondisi perlengkapan jalan yang telah terpasang dan perlengkapan jalan yang dibutuhkan secara berkala.

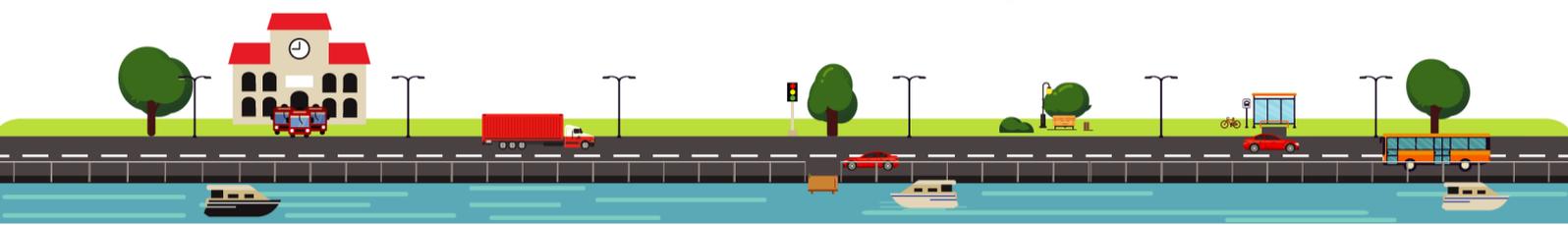
II.2.3.2 IKK3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

Sosialisasi Keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasa, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dan bertransportasi.

Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan pekan nasional keselamatan jalan yang diselenggarakan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan BPTD.

a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi. Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat).



Jumlah masyarakat dihitung berdasarkan laporan pelaksanaan disetiap Balai Pengelola Transportasi Darat dan pelaksanaan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan. Sasaran peserta dari kegiatan Pekan Keselamatan Jalan yaitu mulai dari anak-anak TK hingga SMA

a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2025

Capaian Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2025 sebesar 1000 jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 1000 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.6** Grafik Capaian IKK Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan.



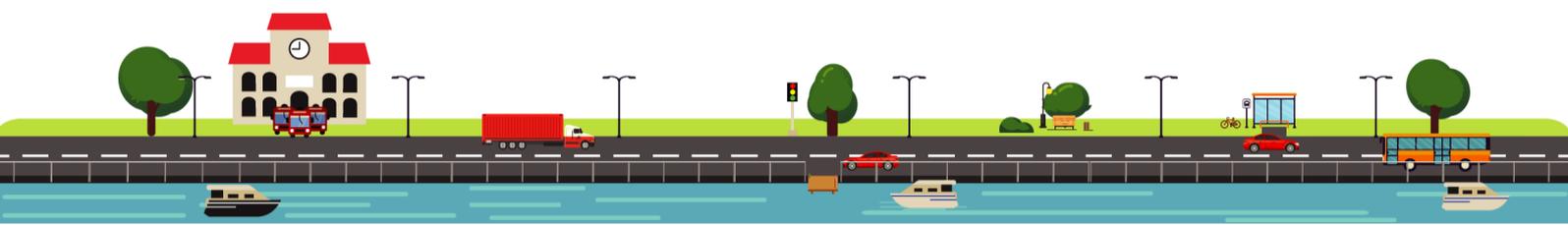
Gambar II. 6 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan.

Berikut ini rincian capain setiap triwulan Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2025 BPTD Kelas II Lampung tahun 2025.

a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Sosialisasi mengenai keselamatan transportasi jalan bisa dipedomani melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan.



- **Kronologi target pada Perjanjian Kinerja**

Target jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan dalam Renstra BPTD Kelas II Lampung Tahun 2020-2025 sebesar 1000 orang, sehingga untuk mencapai target PK di tahun 2025 maka dibuat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 1000 orang. Selain itu juga harus memperhatikan pagu anggaran untuk kegiatan ini supaya nilai dalam pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan target yang ditentukan.

- **Faktor keberhasilan**

Keberhasilan jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan dipengaruhi oleh:

1. Partisipasi yang tinggi dari masyarakat setempat dalam pelaksanaan sosialisasi keselamatan jalan;
2. Kerjasama yang baik antara BPTD dengan pihak sekolah;
3. Persiapan sosialisasi keselamatan transportasi yang matang serta acara yang menarik.

- **Faktor kegagalan atau Potensi Kegagalan**

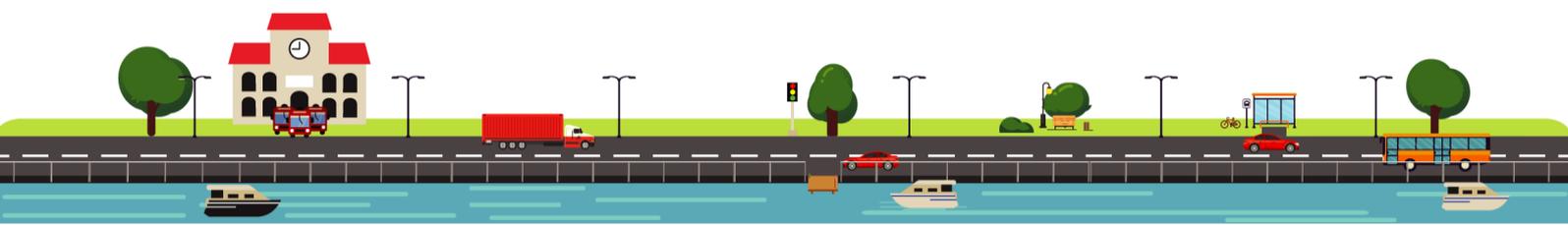
Faktor kegagalan tidak tercapainya Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan antara lain dipengaruhi oleh:

1. Minimnya pengetahuan masyarakat akan keselamatan berlalu lintas yang baik dan benar;
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara di jalan yang baik dan benar;
3. Tidak mengetahui dampak lalu lintas terhadap sector pelaku usaha.

- **Perhitungan Realisasi Kinerja**

Untuk menghitung Indikator Kinerja Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 IKK\ 3.5 &= \frac{\text{Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi}}{\text{Tentang Keselamatan Transportasi Jalan}} \\
 &= 1000
 \end{aligned}$$



- **Perhitungan Capaian Kinerja**

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0}{1000} \times 100\% = 0\%$$

- **Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan**

Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi Tahun 2025 yaitu senilai Rp.357.143.000,- dengan realisasi Tahun 2025 Rp. 0,- atau mencapai 100% dan Nomor Nomenklatur : 4639.PEH.049

a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

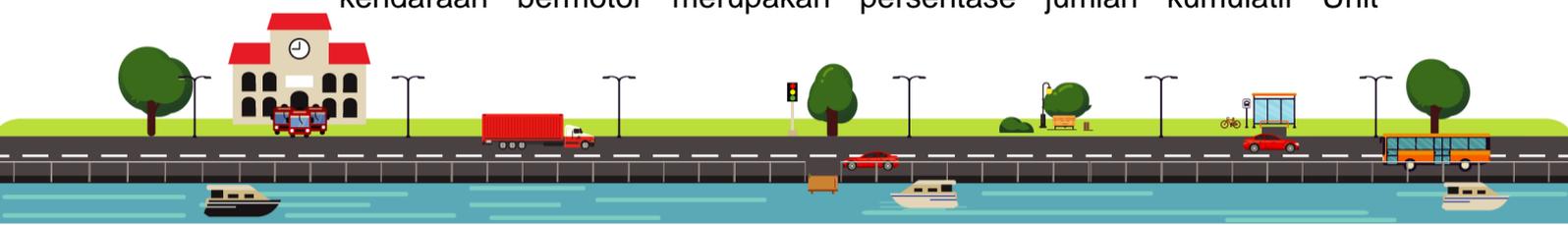
Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan sosialisasi kepada perusahaan angkutan jalan dan penyeberangan terkait standar pelayanan minimal angkutan jalan dan penyeberangan;
2. Memberikan apresiasi kepada perusahaan angkutan jalan yang telah memberikan pelayanan angkutan terbaik kepada masyarakat melalui kegiatan pemilihan PO terbaik;
3. Memberikan apresiasi kepada perusahaan angkutan penyeberangan yang telah memberikan pelayanan angkutan terbaik kepada masyarakat.

II.2.3.7 IKK7a Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pemberian akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan persentase jumlah kumulatif Unit



Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang telah terakreditasi baik milik pemerintah daerah maupun swasta sampai dengan tahun ke n dibandingkan dengan jumlah Pemerintah Daerah di wilayah Lampung dan jumlah Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) milik swasta. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah Pemda Seluruh Pemerintah Kota dan Seluruh Pemerintah Kabupaten di Lampung.

a.2 Perbandingan Target Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2025

Capaian Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2025 sebesar 74,8 jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 74,8 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.7**. Grafik Capaian IKK Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor .



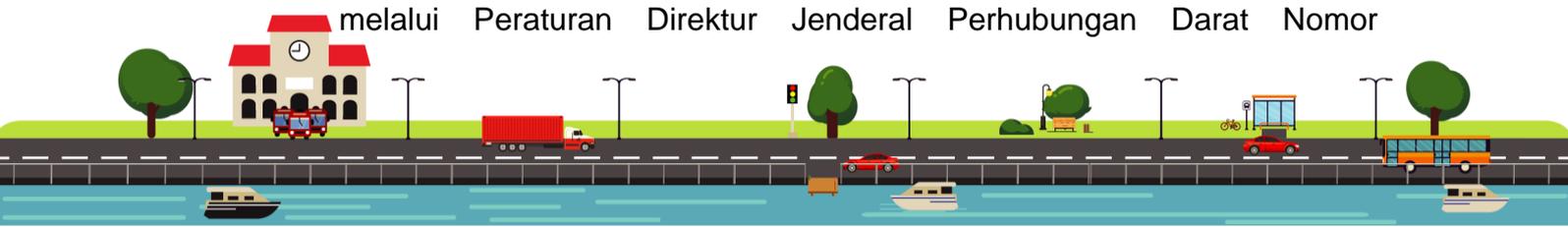
Gambar II. 7 Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Berikut ini rincian capain setiap triwulan Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2025 BPTD Kelas II Lampung tahun 2025.

a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar hukum**

Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor bisa dipedomani melalui Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor



KP.4404/AJ.502/DRJD/2020 Tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor tanggal 21 September 2020. Monitoring Evaluasi dan Akreditasi UPPKB

- **Kronologi target pada Perjanjian Kinerja**

Target persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor dalam Renstra BPTD Kelas II Lampung Tahun 2020-2025 sebesar 74,8%. Tidak ada perubahan target dalam revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

- **Faktor Keberhasilan**

1. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana UPPKB sesuai ketentuan atau undang-undang yang berlaku;
2. Terpenuhinya Fasilitas Pendukung Pelayanan UPPKB;
3. Terpenuhinya Sumber Daya Manusia yang Cakap, Handal dan Sinergitas.

- **Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan**

1. Tidak Layak Sarana dan Prasarana Terminal sehingga pelayanan dalam pengujian kurang maksimal;
2. Minimnya Fasilitas Pendukung di UPPKB;
3. Kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia Cakap, Handal dan Sinergitas.

- **Perhitungan Realisasi Kinerja**

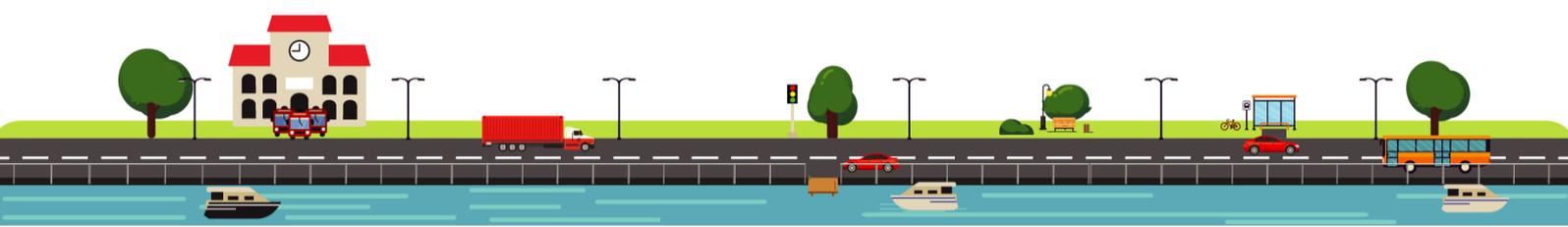
Untuk menghitung Indikator Kinerja Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor rumus sebagai berikut:

$$IKK7a = \frac{\text{Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor}}{\text{Target Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor}} \times 100\%$$

- **Perhitungan Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{74,8}{74,8} \times 100\% = 100\%$$



- **Pagu , Realisasi dan Capaian**

Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Jumlah Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2025 yaitu senilai Rp. 2,570,223,000,- dengan realisasi Tahun 2025 Rp. 730.123.000,- atau mencapai 28,4% dan Nomor nomenklatur 4639.CDP.077.052

a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

1. Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu;
2. Mengusulkan SDM penguji yang berkompeten tiap tahunnya sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan perawatan alat kalibrasi;
4. Melakukan sosialisasi tentang teknis pengujian kendaraan bermotor.

II.2.4 Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 diukur melalui 1 (Satu) Indikator Kinerja Kinerja (IKK) yaitu:

1. IKK 1. Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

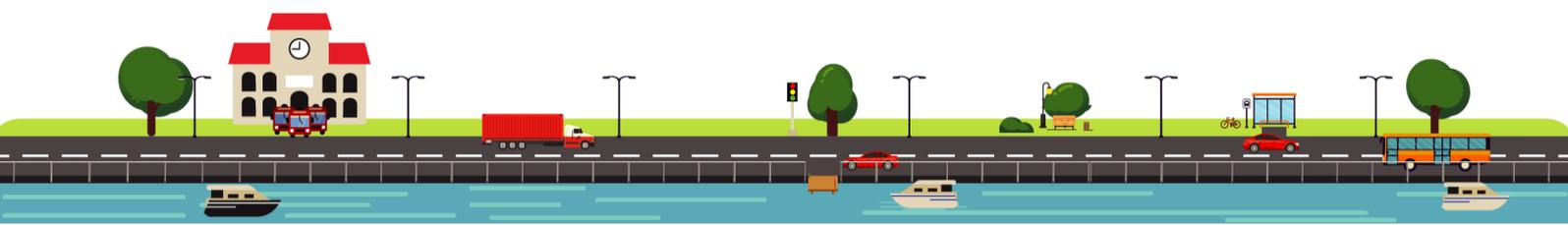
II.2.4.1 IKK5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

- a. Aspek Perencanaan;
- b. Aspek Kepegawaian (SDM);
- c. Aspek Keuangan;
- d. Aspek Penyelenggaraan Perkantoran (umum)

Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja(PK), penginputan aplikasi e-performance.



Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir), kompetensi, kinerja dan disiplin.

Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja. Sedangkan, aspek penyelenggaraan perkantoran dinilai berdasarkan hasil survei indeks kepuasan pegawai satuan kerja terhadap penyelenggaraan perkantoran.

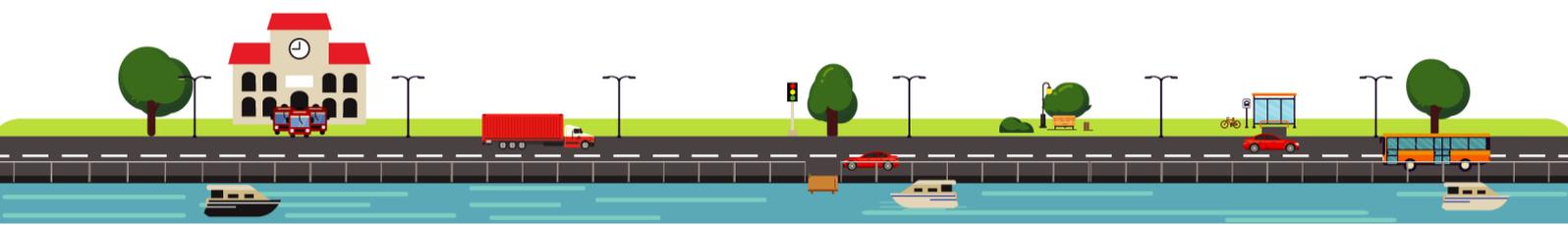
Capaian kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat dilaksanakan dengan melalui berbagai kegiatan diantaranya yaitu: 1) Monitoring Daerah Rawan Kecelakaan Provinsi Lampung, 2) Pengawasan dan Penegakan Hukum 3) Survei LHR Jalan Nasional dan Jalan Tol.

a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2025

Capaian Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sebesar 80 jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 80 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.15** Grafik Capaian IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat .



Gambar II. 8 Capaian IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat



Berikut ini rincian capaian setiap triwulan Capaian IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2025 BPTD Kelas II Lampung tahun 2025.

a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

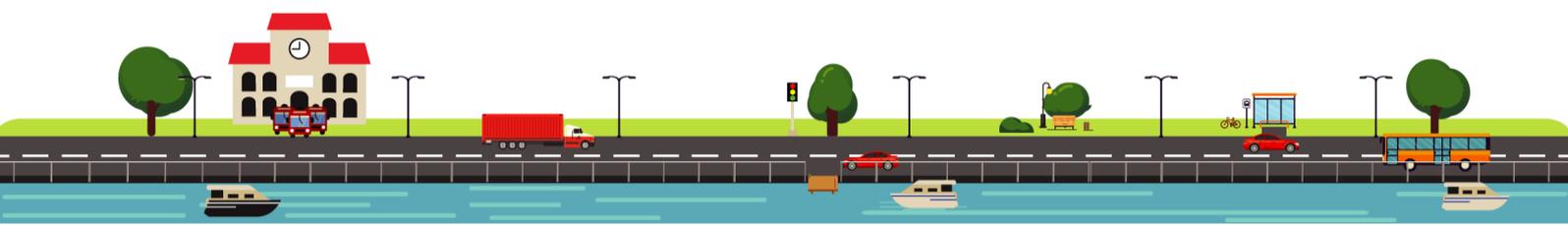
- **Dasar Hukum**

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 perubahan atas PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, maka telah ditetapkan sebagai dasar penyelenggaraan kinerja kualitas dukungan teknis transportasi darat.

- **Kronologi target pada Perjanjian Kinerja**

Pada tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terhadap kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat memiliki target senilai 90 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan. Penyelenggaraan kinerja kualitas dukungan teknis transportasi darat pada tahun 2025 telah dilakukan untuk kegiatan penunjang teknis. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu:

1. Penegakan hukum LLAJ;
2. Sosialisasi WBK/WBBM menuju Zona Integritas BPTD Kelas II Lampung;
3. Bimbingan teknis pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
4. Monitoring penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di UPPKB;
5. Pelaksanaan kehumasan di BPTD Kelas II Lampung;
6. Penyusunan bahan, rencana kerja dan anggaran;
7. Penyusunan bahan, rencana kerja dan anggaran;
8. Penyusunan SAKIP, SPIP, LAPTAH, dan Profil BPTD;
9. Monitoring dan pengawasan angkutan lebaran dan nataru;
10. Monitoring dan pengawasan pembangunan dan pengelolaan bidang perhubungan;



11. Monitoring dan pengawasan sarana dan prasarana Hubdat;
12. Monitoring dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana Ditjen Perhubungan Darat;
13. Monitoring dan pengawasan perlengkapan jalan di jalan nasional;
14. Monitoring dan pengawasan Andalalin
15. Bimbingan teknis dan sosialisasi (sosialisasi Spionam untuk angkutan barang, bimbingan teknis dan sosialisasi perizinan dan Spionam);
16. Manajemen rekayasa lalu lintas;
17. Pembentukan tim penilai Andalalin;
18. Pembentukan tim korps PPNS;
19. Pemeliharaan alat uji marka dan rambu;
20. Rampcheck angkutan danau dan penyeberangan di Provinsi Lampung;
21. Monitoring dan pengawasan TSDP;
22. Pemeriksaan keselamatan kapal (*marine inspektur*);
23. Pengukuran kapal SDP;
24. Bimbingan teknis pelaksanaan operasional penimbangan kendaraan bermotor;
25. Sosialisasi peraturan perundangan bidang penimbangan kendaraan bermotor;
26. Bimbingan teknis pelaksanaan operasional terminal tipe-A di Provinsi Lampung;
27. Sosialisasi reformasi birokrasi pegawai BPTD Kelas II Lampung

- **Faktor keberhasilan**

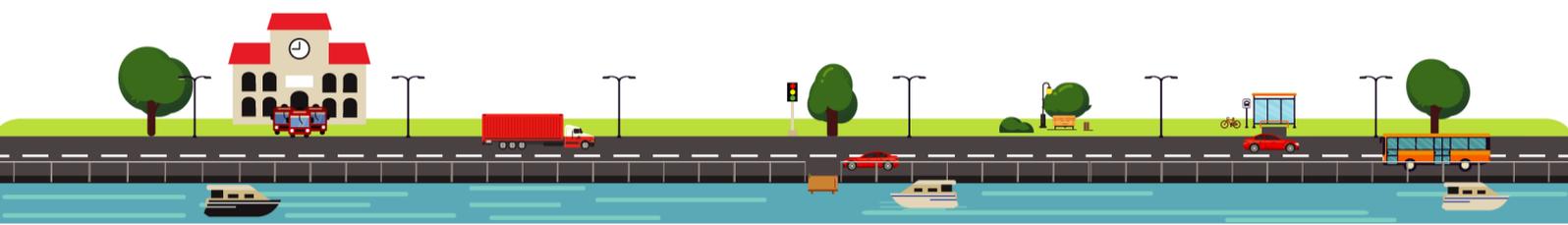
Keberhasilan tercapainya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat antara lain dipengaruhi oleh:

1. Kegiatan terlaksana dengan waktu yang sudah ditentukan;
2. Terkoordinasikannya kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan dengan stakeholder terkait;
3. SDM yang bersolidaritas.

- **Faktor kegagalan atau Potensi Kegagalan**

Kegagalan pada kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat antara lain dipengaruhi oleh:

1. Tidak tercapainya target kegiatan penunjang teknis;



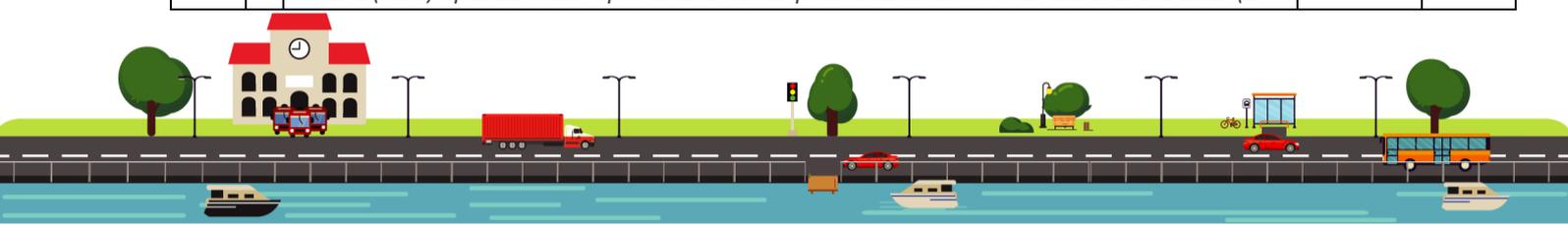
2. Tidak Terealisasi Anggaran pada kegiatan Penunjang teknis;
3. Minimnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten;
4. Adanya pengurangan anggaran;

- **Perhitungan Realisasi Kinerja**

Untuk menghitung Indikator Kinerja Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat bersarkan nilai dari bobot setiap uraian pada formular pada table dibawah.

Tabel II. 5 Perhitungan Realisasi Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan	35%	32
1	SAKIP	20%	20
a	Rencana Strategis (Renstra)		4
	Nilai 4 (empat) apabila selesai = 60 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
	Nilai 2 (dua) apabila selesai 61-90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai >90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
B	Rencana Kerja Tahunan (RKT)		2
	Nilai 2 (dua) apabila selesai >30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (maksimal 1		
	Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 1-30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (2-31		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai =1 hari setelah Awal Tahun Anggaran (=1 Januari)		
C	Perjanjian Kinerja (PK)		4
	Nilai 4 (empat) apabila selesai = 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan		
	Nilai 2 (dua) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20		
D	Rencana Aksi (Renaksi)		4
	Nilai 2 (dua) apabila selesai = 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan		
	Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20		
E	Input Aplikasi e-Performance		4
	Nilai 2 (dua) apabila selalu tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
	Nilai 1 (satu) apabila tidak tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
f	Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I, II, III		2
	Nilai 2 (dua) apabila selalu tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-		
	Nilai 1 (satu) apabila tidak tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-		



		Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)		4
		Nilai 4 (empat) apabila selesai =25 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
	g	Nilai 2 (dua) selesai 25-55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
		Nilai 1 (satu) selesai >55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
	2	Input Aplikasi e-Planning	15%	12
	a	Input Aplikasi e-Planning Pagu Kebutuhan		4
	b	Input Aplikasi e-Planning Pagu Indikatif		4
	c	Input Aplikasi e-Planning Pagu Definitif		4
B		Indeks Profesionalisme ASN	35%	20
	1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)		5
	2	Kompetensi		5
	3	Kinerja		5
	4	Disiplin		5
C		Tingkat Pengelolaan Keuangan	30%	28
	1	Daya Serap Anggaran Satuan Kerja		8
		Nilai 10 (sepuluh) apabila status excellent atau capaian daya serap =100%		
		Nilai 8 (delapan) apabila status on-track atau capaian daya serap 80,1% sampai dengan		
		Nilai 6 (enam) apabila status warning atau capaian daya serap 60,1% sampai dengan 80%		
		Nilai 5 (lima) apabila status alert atau capaian daya serap di bawah 60%		
	2	Tingkat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)		10
		Nilai 10 (sepuluh) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 80,1% sampai		
		Nilai 8 (delapan) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 60,1% sampai		
		Nilai 6 (enam) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 40,1% sampai dengan		
		Nilai 4 (empat) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 20,1% sampai dengan		
		Nilai 2 (dua) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) di bawah 20%		
	3	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut LHP dan LHA (Itjen dan BPK)		10
		Nilai 10 (sepuluh) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
		Nilai 8 (delapan) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 60,1% sampai dengan 80%		
		Nilai 6 (enam) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 40,1% sampai dengan 60%		



	Nilai 4 (empat) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 20,1% sampai dengan 40%		
	Nilai 2 (dua) apabila Persentase TL Tuntas di bawah 20%		
TOTAL NILAI			80

- **Perhitungan Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat = Realisasi/Target × 100% = 80/80 x 100% = 100%

- **Pagu, Realisasi dan Capaian Kinerja**

Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2025 yaitu senilai Rp. 8.728.379.000 - dengan realisasi Tahun 2025 Rp. 1.275.731.286,- atau mencapai 14,6% dan nomor nomenklatur 4640.FAE.923

a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai terhadap tupoksi penyelenggaraan transportasi darat;
2. Melaksanakan bimbingan teknis penyelenggaraan transportasi darat kepada seluruh pegawai;
3. Memberikan reward sebagai bentuk penghargaan kepada pegawai teladan dan untuk memotivasi pegawai lainnya.

II.2.5 Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat

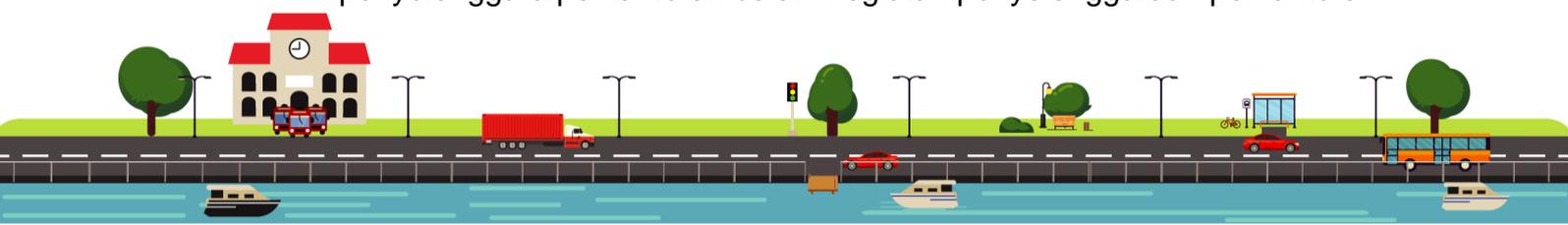
Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 diukur melalui 1 (Satu) Indikator Kinerja Kinerja (IKK) yaitu:

1. IKK 1. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

II.2.5.1 IKK6.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara perkantoran dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran



sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap pimpinan serta setiap pegawai pada unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk mendukung kinerja sebagai bentuk pelayanan prima.

a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2025

Capaian kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 sebesar 84 jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 84 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.17** Grafik Capaian IKK kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat.



Gambar II. 9 Capaian IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

Berikut ini rincian capaian setiap triwulan Capaian Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 BPTD Kelas II Lampung tahun 2025.

a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

• Dasar Hukum

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2025 Kementerian Perhubungan, menargetkan sasaran pelaksanaan Reformas Birokrasi Tahun 2020-2025 sebagai berikut:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
2. Birokrasi yang Kapabel;
3. Pelayanan Publik yang Prima.



- **Kronologi target pada Perjanjian Kinerja**

Pada tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terhadap meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel memiliki target bernilai 84 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Tingkat penyelenggaraan perkantoran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung pada tahun 2025 telah dilakukan secara maksimal untuk tercapainya manajemen pelayanan perkantoran terhadap seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai di Lingkungan BPTD Kelas II Lampung. Adapun beberapa pelayanan perkantoran yang telah diserap yaitu:

1. Pengadaan perangkat pengolah data dan informasi;
2. Operasional dan pemeliharaan kantor;
3. Peningkatan gedung pelayanan BPTD Kelas II Lampung;
4. Gaji dan tunjangan.

- **Faktor keberhasilan**

Keberhasilan tercapainya penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat antara lain dipengaruhi oleh:

1. Tersedianya sarana dan Prasarana kantor yang memadai sesuai dengan kebutuhan;
2. Tercapainya Reformasi birokrasi dalam pelayanan perkantoran;
3. Adanya Sumber Daya Manusia yang berkopeten.

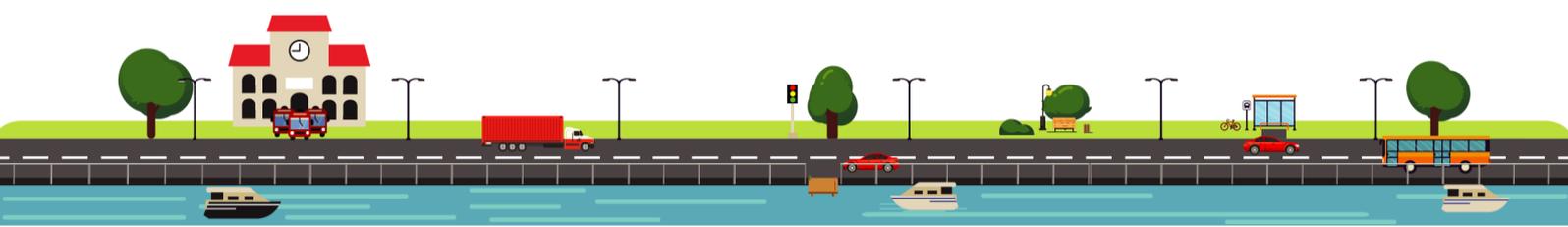
- **Faktor kegagalan atau Potensi Kegagalan**

Faktor kegagalan tidak tercapainya penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat antara lain dipengaruhi oleh

1. Tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten;
3. Tidak tercapainya realisasi anggaran sesuai target.

- **Perhitungan Realisasi Kinerja**

1. Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran dibatasi di lingkup unsur K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja);
2. Indikator Kinerja Kegiatan diukur melalui nilai kuesioner yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%) dan tingkat ketersediaan fasilitas perkantoran;



3. Bobot:

- Kuesioner tingkat kepuasan bagi pejabat tingkat Eselon III, dan Eselon IV (25%);
- Kuesioner tingkat kepuasan bagi Staf (25%);
- Tingkat Ketersediaan fasilitas perkantoran (50%).

Tabel II. 6 Perhitungan Realisasi Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

No	Uraian		Bobot	Nilai
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV		25%	18
	1	Tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	15	11
	2	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	10	7
B	Tingkat Kepuasan Staff		25%	20
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran		50%	46
		Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20	20
		Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai x)	15	15
		Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai x)	15	11
Total Nilai				84

Cara Perhitungan:

A. Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon III dan IV diukur melalui kuesioner;

B. Tingkat Kepuasan Staf diukur melalui kuisoner;

C. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran:

1. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi

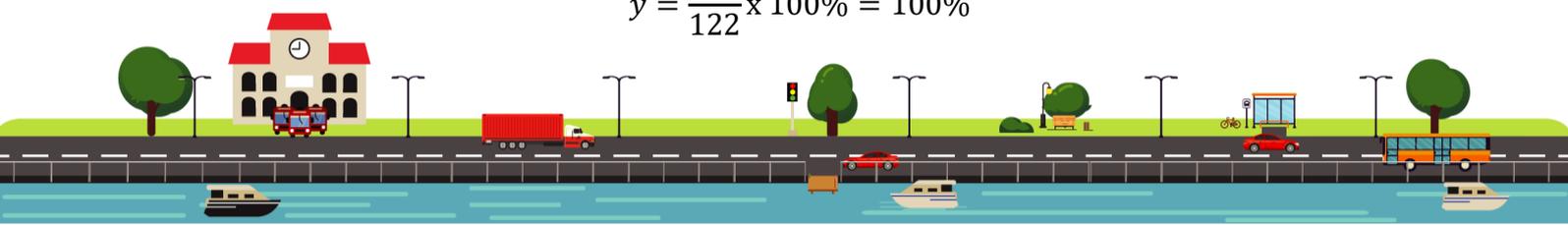
$$x = \frac{\text{Jumlah Kursi dan Meja di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staff)}} \times 100\%$$

$$x = \frac{142}{142} \times 100\% = 100\%$$

2. Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop

$$y = \frac{\text{Jumlah PC atau Laptop Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staff) di Kantor} * } \times 100\%$$

$$y = \frac{122}{122} \times 100\% = 100\%$$



3. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet

$$z = \frac{\text{Rata - rata kecepatan Internet (Unduh) di Kantor **}}{\text{Standar Kecepatan Internet (Unduh) di Kantor ***}} \times 100\%$$

$$z = \frac{73}{100} \times 100\% = 73\%$$

Note:

*) Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf di Kantor) = Jumlah Seluruh Pegawai – Pegawai Perbantuan

Pegawai Perbantuan = Pegawai Kebersihan + Driver + Pramubakti + Security

**) Rata-rata kecepatan internet (unduh) di kantor merupakan rata-rata kecepatan pengunduhan (download) yang diukur pada jam kantor (08-16), pada waktu tertentu dengan sample sekurang-kurangnya 5 lokasi/PC/Laptop di kantor

**) Standar Kecepatan Internet (unduh) di Kantor sebesar 5 Mbps

- **Perhitungan Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

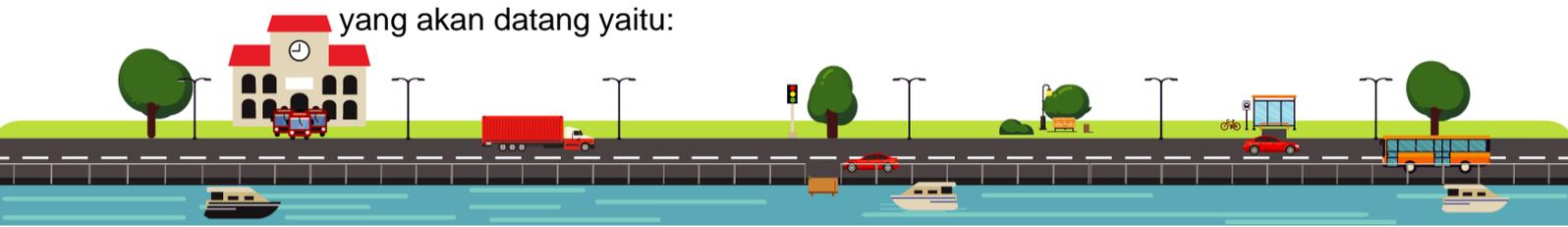
$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = 100\% \\ &= 84/84 \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

- **Pagu, Realisasi dan Capaian Kinerja**

Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2025 yaitu dengan pagu senilai Rp. 33,387,530,000,- dengan realisasi Tahun 2025 Rp. 7.813.610.111,- atau mencapai 97.25% dan nomor nomenklatur 4670.EBA.994 dan 4671.EBA.994

a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:



1. Melakukan sosialisasi terkait pelayanan perkantoran, administrasi dan surat menyurat;
2. Mengusulkan SDM yang sesuai dengan kompetensi penyelenggaraan perkantoran;
3. Memberikan penghargaan kepada seksi atau subbag yang administrasi penyelenggaraan perkantorannya baik dan rapih.

II.3 REALISASI ANGGARAN

II.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2025

II.3.1.1 Pagu Anggaran

1. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2025

Pagu Awal DIPA TA. 2025 sebesar **Rp 73.161.321.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II. 7 Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2025

RM	Rp.	70.594.824.000	95%
PNBP	Rp.	2.566.497.000	5%
Total	Rp.	73.161.321.000	100%

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Lampung

2. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2025

Tabel II. 8 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2025

Belanja Pegawai	Rp.	29.099.200.000	39,8%
Belanja Barang	Rp.	31.051.485.000	42,4%
Belanja Modal	Rp.	13.010.636.000	17,8%
Total	Rp.	73.161.321.000	100%

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Lampung

3. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran.

Tabel II. 9 Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu per Triwulan I TA. 2025

RM	Rp.	70.594.824.000	95%
PNBP	Rp.	2.566.497.000	5%
Total	Rp.	73.161.321.000	100%

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Lampung

Tabel II. 10 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu per Triwulan I TA. 2025

Belanja Pegawai	Rp.	29.099.200.000	39,8%
Belanja Barang	Rp.	31.051.485.000	42,4%
Belanja Modal	Rp.	13.010.636.000	17,8%
Total	Rp.	73.161.321.000	100%

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Lampung



Penambahan dan pergeseran anggaran tersebut sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran sebagai berikut:

1. Revisi DIPA 0 Tanggal 2 Desember 2025;

III.3.1.2. Refocussing Anggaran Tahun 2025

Terdapat perubahan dan pergeseran pagu pada DIPA Ditjen Hubdat TA. 2025 akibat adanya Revisi DIPA di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 perubahan total pagu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II. 11 Rincian Revisi Per Sumber Dana T.A. 2025

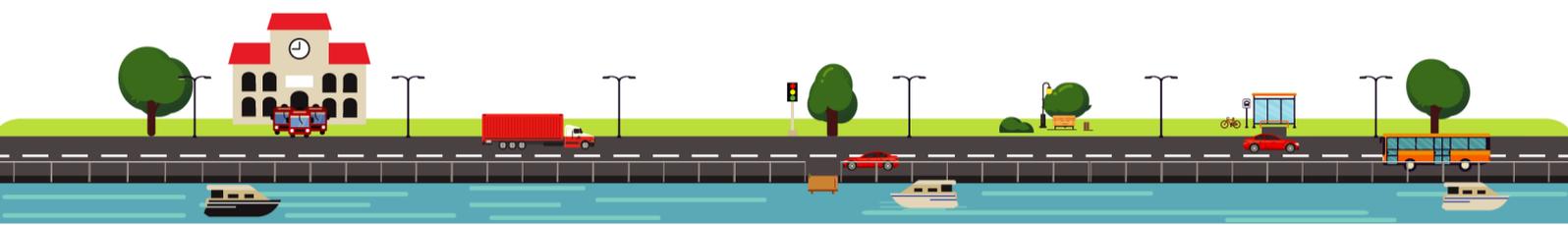
URAIAN	SUMBER DANA		JUMLAH
	RM	PNBP	
Pagu Awal	70.594.824.000	2.566.497.000	73.161.321.000

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Lampung

Tabel II. 12 Rincian Revisi per Jenis Belanja T.A. 2025

URAIAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
	Bel. Pegawai	Bel. Barang	Bel. Modal	
Pagu Awal	29.099.200.000	31.051.485.000	13.010.636.000	73.161.321.000

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Lampung



Pelayanan Transportasi Darat	3.858.739.000	3.858.739.000	226,398,854	5,87									
Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	23.521.035.000	23.521.035.000	730,123,000	3,1									
Penunjang Teknis Transportasi Darat	5.417.212.000	5.417.212.000	291,171,286	5,37									
Program Dukungan Manajemen	36.903.255.000	36.903.255.000	8,814,710,111	23,88									
Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi	7.804.055.000	7.804.055.000	1,763,143,400	22,59									
Pengelolaan Perencanaan . Keuangan. BMN dan Umum Transportasi Darat	29.099.200.000	29.099.200.000	7,051,566,71	24,23									

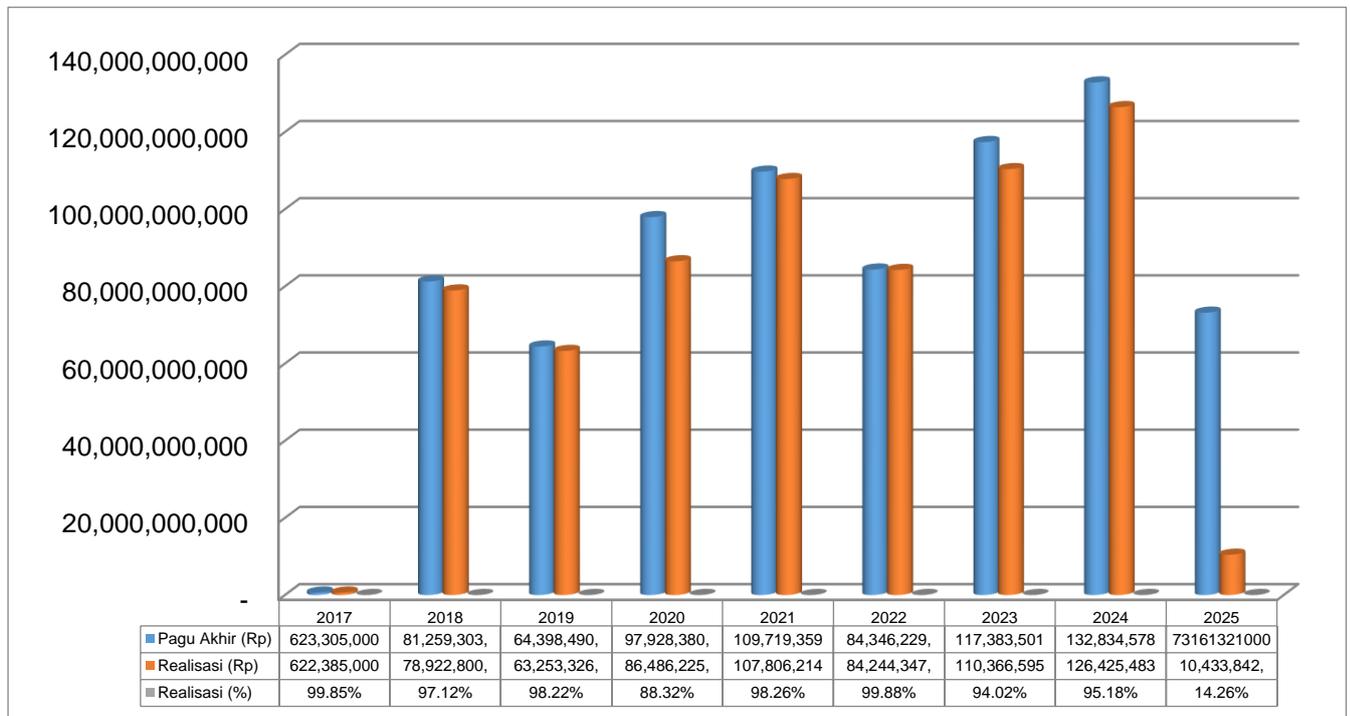
Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Lampung

II.3.1.3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2025

Adapun data perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2017 – 2025, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 15 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 – Tahun 2025

No	Tahun	Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2017	623.305.000	623.305.000	622.385.000	99,85%
2	2018	66.646.441.000	81.259.303.000	78.922.800.092	97,12%
3	2019	66.161.957.000	64.398.490.000	63.253.326.198	98,22%
4	2020	95.435.124.000	87.928.380.001	86.486.225.722	98,36%
5	2021	135.385.144.000	109.719.359.000	107.806.214.490	98,26%
6	2022	99.752.485.000	84.346.229.000	84.244.347.470	99,88%
7	2023	118.718.060.000	117.383.501.000	110.366.595.571	94,02%
8	2024	121.428.966.000	132.834.578.000	126,425,483,784	95,18%
9	2025	73.161.321.000	73.161.321.000	10.433.842.251	14,26%



Gambar II. 10 Grafik Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 – Tahun 2025

Berdasarkan data di atas dapat diketahui nilai pagu awal, pagu akhir, dan realisasi setiap tahunnya, sehingga diketahui masing – masing dana yang terserap setiap tahunnya. Seperti terlihat pada tahun 2025 terjadi penurunan pagu daripada tahun 2024 dan juga penurunan persentase serapan anggaran. Realisasi anggaran tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 126,425,483,784,- atau mencapai 95,18% dari pagu akhir Rp. 132.834.578.000,-. Pada tahun 2025 terjadi penurunan pagu anggaran yaitu sebesar Rp. 73.161.321.000,- dengan realisasi per Triwulan I Rp 10.433.842.251,- atau mencapai 14,26 %.

Realisasi penyerapan anggaran Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 10.433.842.251,-** atau mencapai **14,26%** dari total pagu sebesar **Rp. 73.161.321.000,-**.

II.3.2.2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada tahun 2025 yang sudah di analisis per Triwulan I untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 17 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan I 2025

Jenis Belanja	PAGU AWAL	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Bel Pegawai	29.099.200.000	29.099.200.000	7.051.566.711	24.23%									
Bel Barang	31.051.485.000	31.051.485.000	3.382.275.540	10.89%									
Bel Modal	13.010.636.000	13.010.636.000	0	0									
TOTAL	73.161.321.000	73.161.321.000	10.433.842.251	14.26%									

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per jenis belanja Tahun 2025 pada Triwulan I dengan Capaian Belanja Pegawai 24,23 %, Belanja Barang 10,89 % dan Belanja Modal 0 % dengan capaian keuangan 14,26 dari total Pagu Anggaran 2025

II.3.2.3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada tahun 2025 yang sudah di analisis per Triwulan I, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 18 Realisasi Anggaran Per Jenis Sumber Dana Triwulan I 2025

Jenis Belanja	PAGU AWAL	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
RM	71.094.824.000	71.094.824.000	10.433.842.251	14,67									
PNBP	2.066.497.000	2.066.497.000	0	0									
TOTAL	73.161.321.000	73.161.321.000	10.433.842.251	14,26									



Gambar II. 11 Realisasi Penyerapan Pagu Anggaran Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran Tahun 2025 Pada Triwulan I Sebesar 14,26 % dengan Pagu Rp 71.094.824.000 dengan realisasi Rp 10.433.842.251

II.3.2.4. Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja

Berikut merupakan data dari dana yang tidak terserap oleh unit kerja berdasarkan per jenis belanja, per sumber dana, dan sisa anggaran pada tahun 2025, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 19 Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2025

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Belanja Pegawai	29.099.200.000	7.051.566.711	22.047.633.289
2	Belanja Barang	31.051.485.000	3.382.275.540	27.669.209.460
3	Belanja Modal	13.010.636.000	0	13.010.636.000
TOTAL		73.161.321.000	10.433.842.251	62.727.478.749

Tabel II. 20 Sisa Anggaran Per Sumber Dana Triwulan I Tahun 2025

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Rupiah Murni	71.094.824.000	10.433.842.251	60.660.981.749
2	PNBP	2.066.497.000	0	2.066.497.000
TOTAL		73.161.321.000	10.433.842.251	62.727.478.749

Dari total pagu anggaran BPTD Kelas II Lampung sebesar Rp 73.161.321.000,- (Tujuh Puluh Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) yang dapat terealisasi sebesar Rp 10.433.842.251,- (Sepuluh Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) sehingga total dana yang belum terserap di lingkungan BPTD Kelas II Lampung adalah sebesar Rp 62.727.478.749,- (Enam Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan yang belum terlaksanakan;
 - Pemeliharaan Alat Uji dan Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor
 - Pemeliharaan Alat Uji dan Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor Non Statis
 - Pemeliharaan Local Port Service (LPS)
 - Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai dan Danau
 - Pekan Nasional Keselamatan Jalan Provinsi Lampung
 - Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) (Prioritas Nasional)

- Pengadaan dan Pemasangan Faskes LLAJ Prov Lampung (Prioritas Nasional)
- Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)
- Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) (Prioritas Nasional)
- Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)
- Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Informasi

2. Kegiatan dengan Daya Serap Masih Rendah;

- Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat

3. Sisa Belanja Barang – Rp 27.669.209.460,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembulan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah). Terdiri dari beberapa kegiatan Perlengkapan Jalan dan Pemeliharaan Alat Uji yang mengalami Automatic Adjustment (AA) dari total anggaran (Kegiatan tetap terlaksana tetapi anggaran dibatasi).

4. Sisa Belanja Modal Rp 13.010.636.000,- (Tiga Belas Milyar Sepuluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah). Pekerjaan Perlengkapan jalan yang mengalami Automatic Adjustment (AA) dari total anggaran (Kegiatan tetap terlaksana tetapi anggaran dibatasi).

5. Sisa Belanja Pegawai Rp 22.047.633.289,- (Dua Puluh Dua Milyar Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) .

II.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

II.3.3.1 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan

Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan sasaran program per Triwulan I Tahun 2025, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II. 21 Efisiensi Anggaran

No	Sasaran Kegiatan		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi Triwulan I)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi Triwulan II)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi Triwulan III)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi Triwulan IV)
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	100%	7%	93%									
2	SK2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	100%	8%	92%									
3	SK3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	33%	0%	100%									
4	SK4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	100%	14%	86%									
5	SK5	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	100%	23,4%	76,4%									
Total			86%	14,26%	85,74%									

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Triwulan IV sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 95,18% menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 4,82%.

II.3.3.2 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Analisis Beban Kerja, jumlah kebutuhan SDM di lingkungan BPTD Kelas II Lampung Pada Tahun 2023 sd 2025 adalah sebanyak 345. Sedangkan jumlah SDM di lingkungan lingkungan BPTD Kelas II Lampung saat ini adalah sejumlah 293 yang terdiri :

Tabel II. 22 Jumlah Pegawai BPTD Kelas II Lampung

NO.	KETERANGAN	ASN	PPNP	TOTAL
1	KANTOR INDUK	94	51	145
2	UPPKB WAY URANG	30	24	54
3	TERMINAL RAJABASA	37	35	72
4	TERMINAL BETAN SUBING	5	14	19
5	UPPKB BLAMBANGAN UMPU	-	2	2
6	UPPKB SIMPANG PEMATANG	-	1	1
	TOTAL	293		

Berdasarkan angka tersebut, realisasi Jumlah SDM di lingkungan BPTD Kelas II Lampung adalah sebanyak 293 Pegawai (84,9%). Jika dibandingkan dengan tahun 2024 terjadi perpindahan Satpel BPTD yang sebelumnya masih Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni dibawah Hubdat beralih menjadi KSOP Hubla.

Penambahan SDM di BPTD Kelas II Lampung merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi BPTD Kelas II Lampung. Beberapa upaya yang dilakukan untuk pemenuhan SDM di lingkungan BPTD Kelas II Lampung antara lain :

- a. Redistribusi pegawai di lingkungan BPTD Kelas II Lampung
Redistribusi ini dilaksanakan dengan pemindahan pegawai dari Satpel lain di lingkungan BPTD Kelas II Lampung. Dalam redistribusi ini perlu dicermati ABk dari unit kerja tersebut agar tidak mengganggu beban kerja Satpel tersebut;
- b. Mutasi dari unit kerja di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat
Mutasi ini merupakan perpindahan pegawai dari unit kerja di luar BPTD Kelas II Lampung namun masih dalam Ditjen Perhubungan Darat;
- c. Formasi CASN (CPNS dan PPPK)
Bahwa formasi CASN dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB,

biasanya dengan mempertimbangkan ABK dan kemampuan Anggaran oleh Kemenkeu. Biasanya jumlah alokasi formasi yang diberikan oleh Kementerian PAN dan RB hanya sebagian dari total usulan.

Tabel II. 23 Perbandingan Jumlah Kebutuhan dan Jumlah Eksisting SDM

No	Jumlah Kebutuhan SDM	Realisasi SDM	Capaian SDM
1	345	293	84,9%

III.4. Hambatan dan Kendala

Beberapa Hambatan/Kendala masih rendahnya realisasi daya serap anggaran yaitu

1. Sistem perencanaan yang masih kurang matang mengenai pemahaman kebutuhan anggaran. Dalam kegiatan kekurangan data pendukung dalam mengerjakan proyek menjadi kendala yaitu Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan;
2. Kementerian dan Lembaga mengalami Efisiensi Anggaran karena kebijakan Pemerintah mengakibatkan beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan.
3. Masih terjadi keterlambatan dalam penyampaian data dukung pencairan dari pihak penyedia sehingga penyerapan menjadi mundur dari rencana;
4. Terdapat revisi anggaran, yang dimana rekomendasi dari Kemenkeu adalah maksimal 1 kali per triwulan.

Hal yang menyebabkan kegagalan pemenuhan kebutuhan SDM:

1. Pembatasan penerimaan PPNPN (efek PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK);
2. Moratorium penerimaan CPNS.



BAB III

PENUTUP

BAB III

PENUTUP

III.1 Penutup

III.1.1 Ringkasan Capaian

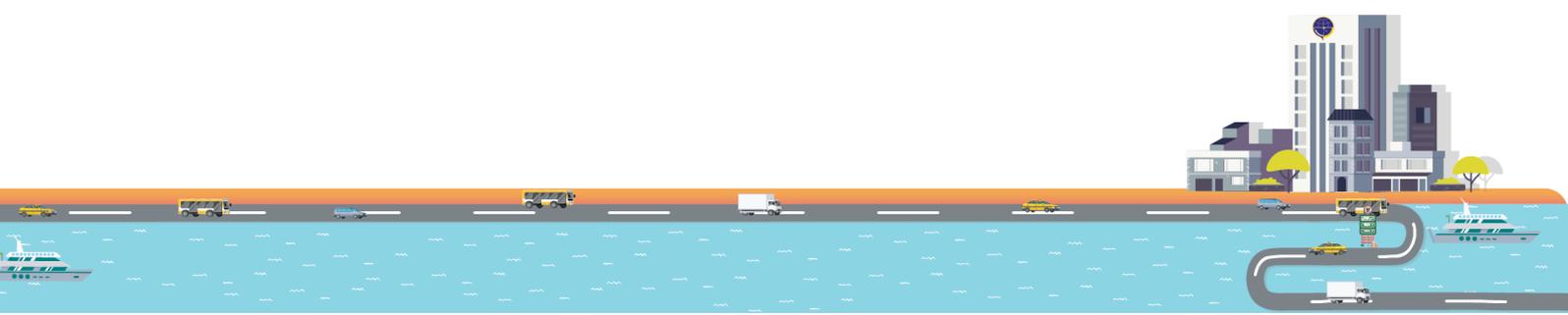
Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sebagai penutup dari Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

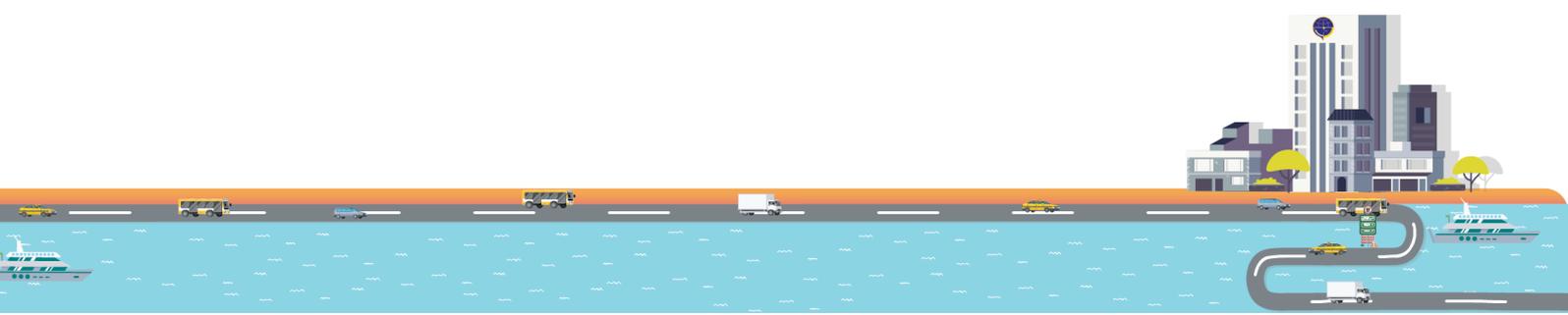
1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan Tahun 2025 ini terdapat 5 Sasaran Kegiatan Kerja Yaitu : 1. Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi, 2. Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat, 3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat, 4. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat, 5. Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel dan 9 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung. Pada Tahun 2025 terdapat 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$).

Sembilan Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$) yaitu :

- Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan dengan realisasi mencapai 100%;
- Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi dengan realisasi mencapai 100% ;



- Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal mencapai 100% ;
 - Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP dengan realisasi 100%;
 - Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal dengan realisasi 0%;
 - Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan dengan realisasi 0%;
 - Presentase Standarisasi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor dengan realisasi mencapai 100%;
 - Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat dengan realisasi mencapai 100%;
 - Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat dengan realisasi mencapai 100%.
2. Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun selanjutnya, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung akan melakukan proses yang lebih selektif terhadap pengusulan target Renstra dengan menerapkan skala prioritas untuk peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dengan pertimbangan ketersediaan anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung;
 3. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung juga akan meningkatkan koordinasi dengan melakukan monitoring keselamatan dan keamanan transportasi darat dan penyeberangan agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju *zero accident*.

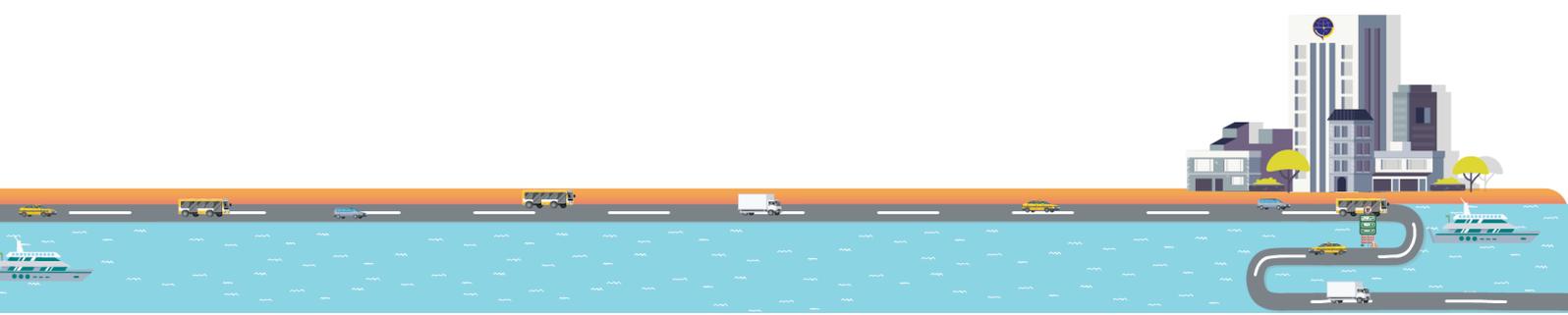


III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

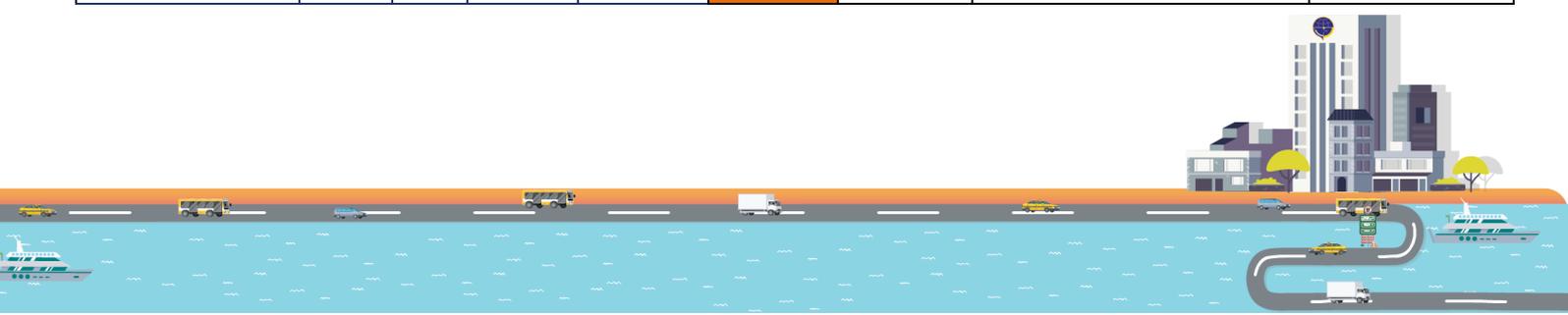
Adapun hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab dijabarkan sebagai berikut:

Tabel III. 1 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

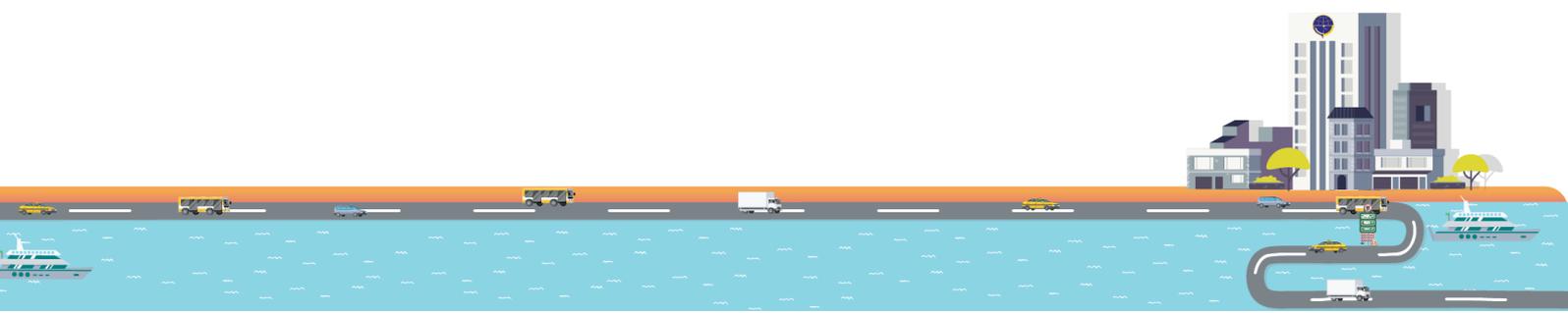
SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	Tahun 2025			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
			TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SK 1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi					100%			100%
IKK 1.1 Prosentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100	100	100	100%	TERCAPAI	1. Menyediakan atau memberikan subsidi untuk pelayanan angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah - daerah tersebut	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi	Lokasi	2	2	2	100%	TERCAPAI	1. Mengusulkan ke depannya untuk mengoperasikan seluruh terminal yang berada di wilayah kerja BPTD Kelas II Lampung demi memberikan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan fasilitas prasarana transportasi umum yang lebih baik dan nyaman 2. Menyediakan ruang tunggu dan tempat makan yang lebih baik bagi penumpang melalui usulan kegiatan di tahun – tahun berikutnya 3. Menyediakan ruang parkir bagi kendaraan penumpang untuk mendukung sistem Transit Oriented Development (TOD)	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	Lokasi	6	6	6	100%	TERCAPAI	1. Mengusulkan ke depannya untuk mengoperasikan seluruh pelabuhan dan dermaga yang berada di wilayah kerja BPTD Kelas II Lampung demi memberikan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan fasilitas prasarana transportasi umum yang lebih baik dan nyaman 2. Menyediakan ruang tunggu dan tempat makan yang lebih baik bagi penumpang melalui usulan kegiatan di tahun – tahun berikutnya 3. Menyediakan ruang parkir bagi kendaraan penumpang untuk mendukung sistem Transit Oriented Development (TOD)	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK 2 Meningkatkan Pelayanan Transportasi Darat					100%			



IKK 2.3	Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	80	80	80	100%	TERCAPAI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan standar operasional pelabuhan SDP 2. Memberikan reward dan punishment terkait pelaksanaan standar pelayanan minimum 	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK 3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi					33%			
IKK 3.1	Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	80	80	0	0%	BELUM TERCAPAI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap pemasangan perlengkapan jalan 2. Melakukan survei terkait titik – titik pemasangan baru perlengkapan jalan 3. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah atau instansi lain terkait perlengkapan jalan 	Seksi Lalu Lintas dan Pengawasan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
IKK 3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	1000	1000	0	0%	BELUM TERCAPAI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi kepada perusahaan angkutan jalan terkait standar pelayanan minimal angkutan jalan. 2. Melaksanakan kegiatan pekan keselamatan jalan dengan tujuan memberikan edukasi tentang keselamatan transportasi kepada masyarakat 3. Memberikan apresiasi kepada perusahaan angkutan jalan yang telah memberikan pelayanan angkutan terbaik kepada masyarakat melalui kegiatan pemilihan PO terbaik. 	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
IKK 3.7	Presentase Standarisasi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	%	74,8	74,8	74,8	100%	TERCAPAI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan SDM penguji yang berkompeten tiap tahunnya sesuai kebutuhan 2. Melaksanakan perawatan alat kalibrasi 3. Melakukan sosialisasi tentang teknis pengujian kendaraan bermotor 	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat					100%			
IKK 5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	80	80	80	100%	TERCAPAI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai terhadap tupoksi penyelenggaraan transportasi darat 2. Melaksanakan bimbingan teknis penyelenggaraan transportasi darat kepada seluruh pegawai 	Sub Bagian Tata Usaha



SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel					100%			
IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	84	84	84	100%	TERCAPAI	1. Melakukan sosialisasi terkait pelayanan perkantoran, administrasi dan surat menyurat 2. Mengusulkan SDM yang sesuai dengan kompetensi penyelenggaraan perkantora 3. Memberikan penghargaan kepada seksi atau subbag yang administrasi penyelenggaraan perkantorannya baik dan rapih	Sub Bagian Tata Usaha
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Program						86%			
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Program						77%			
Jumlah Indikator Kinerja Program yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKP ≥ 100%)						7			
Jumlah Indikator Kinerja Program kurang dari 100% (0% ≤ IKP < 100%)						2			





LAMPIRAN



RENCANA KINERJA TAHUNAN

20 25

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat



RENCANA KERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI KELAS II LAMPUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	80
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	74,8
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	84

Bandar Lampung, 19 Desember 2024
 Plt. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
 Kelas II Lampung



BUDI SANTOSO, S.SIT., M.M.Tr.
 NIP. 19840603 200604 1 002



Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung
Tahun 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2025
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung
Tahun 2025

No	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Dikonsep	Endri Gunawan, A.md Zenitta Utami, A.Md.Tra	Staf Perencanaan dan Pelaporan	2/1/2025 2/1/2025	
2	Diperiksa	Budi Santoso, S.SiT.,M.M.Tr	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	3/1/25	
3	Diperiksa	Djoko Srijanto, ATD.,M.Si	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	2/1/25	
4	Diperiksa	Dedi Setiawan, S.Sos	Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	2/1/25	
5	Diperiksa	Taofan Andriana, S.T.M.A	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan	2/1/25	
6	Disetujui	Budi Santoso, S.SiT.,M.M.Tr	Plt. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung	3/1/25	



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budi Santoso, S.Si.T., M.M.Tr.

Jabatan : Plt. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ahmad Yani, A.T.D., M.T.

Jabatan : Plt Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, 2 Januari 2025

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Ahmad Yani, A.T.D., M.T.
NIP. 19650930 199003 1 003

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Lampung

Budi Santoso, S.Si.T., M.M.Tr.
NIP. 19840603 200604 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	80
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	74,8
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1 Tingkat penyelenggaran perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	84

KEGIATAN

		ANGGARAN
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 3.461.080.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 3.858.737.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 23.521.035.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 5.417.212.000
5.	Pengelola Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 7.804.055.000
6.	Pengelola Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 29.099.200.000

Disetujui
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Ahmad Yani, A.T.D., M.T.
NIP. 19650930 199003 1 003

Bandar Lampung, 2 Januari 2025
Plt. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Lampung



Budi Santoso, S.Si.T., M.M.Tr.
NIP. 19840603 200604 1 002

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
							Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Rp 3,461,080,000	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	Pengelolaan Operasional Terminal Penumpang Tipe A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Rp 2,680,079,000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	6	Pengelolaan Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Rp 1,362,760,000
Pemeliharaan Local Port Service (LPS)												Rp 500,000,000								
Pengadaan Rambu Sungai dan Danau												Rp 1,000,000,000								
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	80	Monitoring Pengawasan SPM, Inspeksi Keselamatan, dan Evaluasi Kinerja Angkutan Penyeberangan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Rp 300,000,000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	0	0	0	20	20	30	40	50	60	70	75	80	Rp 1,250,000,000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
						Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK)													Rp 1,677,736,000	
						Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan													Rp 14,987,736,000	
						Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)													Rp 3,656,740,000	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab					
							Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12							
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	Rp 250,000,000	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan				
						Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) (Prioritas Nasional)																		Rp 107,143,000	
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	74.8	Pengelolaan Operasional UPPKB	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	Rp 2,565,629,000	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan					
						Pemeliharaan Alat Uji dan Alat kalibrasi Kendaraan Bermotor																		Rp 555,400,000	
SK5	Meningkatnya Kualitas	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan	Nilai	80	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Rp 3,861,420,000	Sub Bagian Tata Usaha					
						Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan																	Rp 117,304,000		
						Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan																		Rp 204,558,000	
						Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana																		Rp 340,510,000	
						Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas																		Rp 195,380,000	
						Monitoring Pengendalian Lalu Lintas																			Rp 314,520,000
						Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas dan																			Rp 383,520,000
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	84	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	Rp 7,559,055,000	Sub Bagian Tata Usaha					
						Layanan Perkantoran (Gaji)																	Rp 29,099,200,000		
						Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi																		Rp 245,000,000	

Bandar Lampung, 2 Januari 2025

Pit. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung



BUDI SANTOSO, S.Si.T., M.M.Tr.
NIP. 19840603 200604 1 002

**Monitoring Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja
BPTD Kelas II Lampung**

Bulan : Januari Tahun : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Januari				Realisasi Bulan Januari		% Capaian Bulan Januari		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran				
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	Volume	Volume				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis	Perbandingan antara jumlah pelayanan angkutan perintis di jalan dengan jumlah pelayanan yang direncanakan	100	100	100%	Rp 3,461,080,000	100%	100%	-	100%	0%	Seluruh trayek Angkutan Jalan Perintis yang telah ditetapkan 4 trayek dan sudah terlayani 100% yang sudah berjalan mulai 22 Januari 2025 dan Penyerapan anggaran masih Rp 0, karena masih tahap pengajuan termin 1	Memastikan dan mengawasi penyedia jasa angkutan subsidi perintis melayani trayek yang sudah ditentukan	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	Pengelolaan Operasional Terminal Penumpang Tipe A	Terpenuhinya Pelayanan Prima dan meningkatnya Data Produksi Terminal	2	2	100%	Rp 2,680,079,000	100%	2	Rp160,145,000	100%	6%	Telah terlaksana pengoperasian terminal oleh BPTD Kelas II Lampung yaitu Terminal Rajabasa dan Terminal Betan Subing sudah terlayani 100% ,	Memastikan Operasional diterminal meliputi pelayanan fasilitas utama, pendukung dan penunjang terlaksana sesuai dengan SOP yang berlaku guna memberikan pelayanan yang optimal ke masyarakat	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	6	Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dikelola	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	6	6	100%	Rp0	100%	6	Rp0	100%	0.00%	Telah Terlaksana kinerja Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi dengan capain kinerja 100% dengan realisasi anggaran 0% terdiri kegiatan Pengelolaan Operasional Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, dan Pemeliharaan LPS dan Pengadaan Rambu Sungai dan Danau, untuk kegiatan kontraktual dalam tahap persiapan kegiatan.	Memastikan Operasional di Pelabuhan meliputi pelayanan fasilitas utama, pendukung dan penunjang terlaksana sesuai dengan SOP yang berlaku guna memberikan pelayanan yang optimal ke masyarakat	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
					Pemeliharaan Local Port Service (LPS)											Persiapan kegiatan secara detail agar pekerjaan terlaksana dengan baik dan tepat waktu sesuai kontrak			
					Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai dan Danau											Persiapan kegiatan secara detail agar pekerjaan terlaksana dengan baik dan tepat waktu sesuai kontrak			
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	80	Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan	Jumlah Pelabuhan yang memenuhi SPM dan Jumlah Pelabuhan yang dipantau	80	80	100%	Rp204,558,000	100%	80	Rp11,460,000	100%	6%	Pengawasan Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan sudah terlaksana 100% meliputi kegiatan monitoring kinerja angkutan dan inspeksi keselamatan dengan realisasi anggaran mencapai 6%	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal di pelabuhan SDP	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	Pengadaan dan Pemasangan Faskes LLAJ Prov Lampung (Prioritas Nasional)	Terpasangnya Fasilitas Perlengkapan jalan disetiap ruas dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Ruas Provinsi Lampung	80	80	100%	Rp18,644,476,000	100%	0	Rp0	0.0%	0.00%	Persentase perlengkapan jalan telah terpasang sesuai kondisi kebutuhan masyarakat meliputi kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan, Bantuan Teknis, LRK, serta Pemeliharaan Perlengkapan Jalan. Semua kegiatan masih tahap persiapan	Melaksanakan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebutuhan	Seksi Lalu Lintas dan Pengawasan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
						Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) (Prioritas Nasional)	Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah atau Instansi lain terkait kebutuhan perlengkapan jalan												
						Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	Memastikan semua titik LRK di provinsi lampung dilakukan perbaikan agar mengurangi angka kecelakaan di ruas jalan lampung												
																Melaksanakan pemeliharaan perlengkapan jalan agar tetap terpasang secara sempurna di ruas jalan.			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Januari				Realisasi Bulan Januari		% Capaian Bulan Januari		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000	Pekan Nasional Keselamatan Jalan Provinsi Lampung	Meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dan bertransportasi.	1000	1000	100%	Rp 357,143,000	100%	1000	Rp0	0	0	Kinerja Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan dilaksanakan pada kegiatan Pekan Keselamatan Jalan dan Sadar Lalu Lintas Usia Dini, masing kegiatan masih tahap persiapan.	Mempersiapkan kegiatan agar lebih meriah dan banyak peserta dari umum, sehingga banyak masyarakat tersosialisasikan tentang kesadaran keselamatan bertransportasi.	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK 3.7 a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	74.8	Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Dikelola	Presentase jumlah kumulatif unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor(UPUBKB) yang telah terakreditasi baik	74.8	74.8	100%	Rp 3,012,416,000	100%	74.8	Rp 91,335,000	100%	3.03%	Kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor mencapai 100% dengan kegiatan yaitu Operasional UPPKB dan pemeliharaan alat uji kalibrasi Realisasi anggaran untuk kegiatan tersebut mencapai 3,03%	Mengusulkan SDM penguji kendaraan bermotor yang berkompeter tiap tahunnya sesuai kebutuhan, Melakukan sosialisasi tentang teknis pengujian kendaraan bermotor.	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
			Pemeliharaan Alat Uji dan Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor Non Statis				milik pemerintah daerah maupun swasta										Melaksanakan Pemeliharaan Alat uji kalibrasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku agar alat dalam kondisi baik untuk menguji kendaraan		
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80	Pengelolaan Bidang Ketatatusahaan	Berkurangnya daerah rawan kecelakaan dan pelanggaran ODOL	80	80	100%	Rp 8,728,379,000	100%	80	Rp318,894,020	100%	3.65%	Kinerja Kualitas penyelenggaraan pendukung teknis transportasi darat mencapai 100% meliputi Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat denga presentase capaian keuangan 3,65 %	Merencanakan perbaikan penyelenggaraan kegiatan monitoring, inspeksi dan pengawasan terhadap angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan di BPTD secara berkesinambungan	Sub Bagian Tata Usaha
			Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan																
			Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana																
			Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas																
			Monitoring Pengendalian Lalu Lintas																
			Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas dan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat																
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	84	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna,	84	84	100%	Rp33,387,530,000	100%	84	Rp 2,391,559,274	100%	7.16%	Telah dilaksanakan kegiatan penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat telah dilaksanakan 100% meliputi kegiatan Operasional kantor, Pengadaan Perangkat Pengolah data dan Informasi dan Gaji pegawai ,realisasi anggaran mencapai 7,16%	Menggunakan kebutuhan kantor yang efektif dan serba guna, melakukan pemeliharaan gedung secara periodik	Sub Bagian Tata Usaha
			Gaji dan Tunjangan														Melaksanakan evaluasi kinerja menggunakan SKP untuk penilaian Tukin Pegawai		
			Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi														Menggunakan produk dalam negeri untuk pengadaan perangkat data dan informasi		

**Monitoring Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja
BPTD Kelas II Lampung**

Bulan : Februari Tahun : 2025

(1) No	(2) Sasaran Strategis	(3) Indikator Kinerja	(4) Satuan	(5) Target dalam PK	(6) Kegiatan	(7) Indikator Kinerja Output	(8) Target Kinerja Output	Target Bulan Februari				Realisasi Bulan Februari		% Capaian Bulan Februari		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran				
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	Volume	Volume				
(17)	(18)	(19)																	
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis	Perbandingan antara jumlah pelayanan angkutan perintis di jalan dengan jumlah pelayanan yang direncanakan	100	100	100%	Rp 3,461,080,000	100%	100%	-	100%	0%	Seluruh trayek Angkutan Jalan Perintis yang telah ditetapkan 4 trayek dan sudah terlayani 100% yang sudah berjalan mulai 22 Februari 2025 dan Penyerapan anggaran masih Rp 0, karena masih tahap pengajuan termin 1	Memastikan dan mengawasi penyedia jasa angkutan subsidi perintis melayani trayek yang sudah ditentukan	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	Pengelolaan Operasional Terminal Penumpang Tipe A	Terpenuhinya Pelayanan Prima dan meningkatnya Data Produksi Terminal	2	2	100%	Rp 2,680,079,000	100%	2	Rp188,765,000	100%	7%	Telah terlaksana pengoperasian terminal oleh BPTD Kelas II Lampung yaitu Terminal Rajabasa dan Terminal Betan Subing sudah terlayani 100% ,	Memastikan Operasional diterminal meliputi pelayanan fasilitas utama, pendukung dan penunjang terlaksana sesuai dengan SOP yang berlaku guna memberikan pelayanan yang optimal ke masyarakat	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	6	Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dikelola	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	6	6	100%	Rp4,180,079,000	100%	6	Rp12,420,000	100%	0.30%	Telah Terlaksana kinerja Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi dengan capain kinerja 100% dengan realisasi anggaran 0% terdiri kegiatan Pengelolaan Operasional Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Pemeliharaan LPS dan Pengadaan Rambu Sungai dan Danau, untuk kegiatan kontraktual dalam tahap persiapan kegiatan.	Memastikan Operasional di Pelabuhan meliputi pelayanan fasilitas utama, pendukung dan penunjang terlaksana sesuai dengan SOP yang berlaku guna memberikan pelayanan yang optimal ke masyarakat	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	80	Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan	Jumlah Pelabuhan yang memenuhi SPM dan Jumlah Pelabuhan yang dipantau	80	80	100%	Rp204,558,000	100%	80	Rp16,540,000	100%	8%	Pengawasan Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan sudah terlaksana 100% meliputi kegiatan monitoring kinerja angkutan dan inspeksi keselamatan dengan realisasi anggaran mencapai 8%	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal di pelabuhan SDP	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Februari				Realisasi Bulan Februari		% Capaian Bulan Februari		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
								Target Output	Target Anggaran	Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran						
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	Pengadaan dan Pemasangan Faskes LLAJ Prov Lampung (Prioritas Nasional)	Terpasangnya Fasilitas Perlengkapan jalan disetiap ruas dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Ruas Provinsi Lampung	80	80	100%	Rp18,644,476,000	100%	0	Rp0	0.0%	0%	Persentase perlengkapan jalan telah terpasang sesuai kondisi kebutuhan masyarakat meliputi kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan, Bantuan Teknis, LRK, serta Pemeliharaan Perlengkapan Jalan. Semua kegiatan masih tahap persiapan	Melaksanakan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebutuhan	Seksi Lalu Lintas dan Pengawasan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
			Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)													Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah atau Instansi lain terkait kebutuhan perlengkapan jalan			
			Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) (Prioritas Nasional)													Memastikan semua titik LRK di provinsi lampung dilakukan perbaikan agar mengurangi angka kecelakaan di ruas jalan lampung			
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000	Pekan Nasional Keselamatan Jalan Provinsi Lampung	Meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dan bertransportasi.	1000	1000	100%	Rp 357,143,000	100%	1000	Rp0	0	0%	Kinerja Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan dilaksanakan pada kegiatan Pekan Keselamatan Jalan dan Sadar Lalu Lintas Usia Dini, masing kegiatan masih tahap persiapan.	Mempersiapkan kegiatan agar lebih meriah dan banyak peserta dari umum, sehingga banyak masyarakat tersosialisasikan tentang kesadaran keselamatan bertransportasi.	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK 3.7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	74.8	Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Dikelola	Presentase jumlah kumulatif unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor(UPUBKB) yang telah terakreditasi baik milik pemerintah daerah maupun swasta	74.8	74.8	100%	Rp 3,012,416,000	100%	74.8	Rp 115,263,000	100%	3.83%	Kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor mencapai 100% dengan kegiatan yaitu Operasional UPPKB dan pemeliharaan alat uji kalibrasi Realisasi anggaran untuk kegiatan tersebut mencapai 3,83%	Mengusulkan SDM penguji kendaraan bermotor yang berkompeten tiap tahunnya sesuai kebutuhan, Melakukan sosialisasi tentang teknis pengujian kendaraan bermotor.	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
			Pemeliharaan Alat Uji dan Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor Non Statis												Melaksanakan Pemeliharaan Alat uji kalibrasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku agar alat dalam kondisi baik untuk menguji kendaraan				
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	Berkurangnya daerah rawan kecelakaan dan pelanggaran ODOL	80	80	100%	Rp 8,728,379,000	100%	80	Rp376,136,286	100%	4.31%	Kinerja Kualitas penyelenggaraan pendukung teknis transportasi darat mencapai 100% meliputi Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat dengan presentase capaian keuangan 4,31 %	Merencanakan perbaikan penyelenggaraan kegiatan monitoring, inspeksi dan pengawasan terhadap angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan di BPTD secara berkesinambungan	Sub Bagian Tata Usaha
			Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan																
			Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana																
			Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas																
			Monitoring Pengendalian Lalu Lintas																
			Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas dan																
			Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat																
SK6	Meningkatnya Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	84	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Penyelenggaraan perkantoran ditunjukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna,	84	84	100%	Rp33,387,530,000	100%	84	Rp 4,214,847,719	100%	12.62%	Telah dilaksanakan kegiatan penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat telah dilaksanakan 100% meliputi kegiatan Operasional kantor, Pengadaan Perangkat Pengolah data dan Informasi dan Gaji pegawai, realisasi anggaran mencapai 12,62%	Menggunakan kebutuhan kantor yang efektif dan serba guna, melakukan pemeliharaan gedung secara periodik	Sub Bagian Tata Usaha
			Gaji dan Tunjangan														Melaksanakan evaluasi kinerja menggunakan SKP untuk penilaian Tukin Pegawai		
			PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN INFORMASI														Menggunakan produk dalam negeri untuk pengadaan perangkat data dan informasi		

**Monitoring Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja
BPTD Kelas II Lampung**

Bulan : Maret Tahun : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Maret				Realisasi Bulan Maret		% Capaian Bulan Maret		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran				
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	Volume	Volume				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keberintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis	Perbandingan antara jumlah pelayanan angkutan perintis di jalan dengan jumlah pelayanan yang direncanakan	100	100	100%	Rp 3,461,080,000	100%	100%	371,439,000	100%	11%	Seluruh trayek Angkutan Jalan Perintis yang telah ditetapkan 4 trayek dan sudah terlayani 100% yang sudah berjalan mulai 22 Februari 2025 dan Penyerapan anggaran mencapai 11%	Memastikan dan mengawasi penyedia jasa angkutan subsidi perintis melayani trayek yang sudah ditentukan	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	Pengelolaan Operasional Terminal Penumpang Tipe A	Terpenuhinya Pelayanan Prima dan meningkatnya Data Produksi Terminal	2	2	100%	Rp 2,680,079,000	100%	2	Rp213,978,854	100%	8%	Telah terlaksana pengoperasian terminal oleh BPTD Kelas II Lampung yaitu Terminal Rajabasa dan Terminal Betan Subing sudah terlayani 100% ,	Memastikan Operasional diterminal meliputi pelayanan fasilitas utama, pendukung dan penunjang terlaksana sesuai dengan SOP yang berlaku guna memberikan pelayanan yang optimal ke masyarakat	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	6	Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dikelola	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	6	6	100%	Rp4,180,079,000	100%	6	Rp12,420,000	100%	0.30%	Telah Terlaksana kinerja Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi dengan capain kinerja 100% dengan realisasi anggaran 0% terdiri kegiatan Pengelolaan Operasional Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Pemeliharaan LPS dan Pengadaan Rambu Sungai dan Danau, untuk kegiatan kontraktual dalam tahap persiapan kegiatan.	Memastikan Operasional di Pelabuhan meliputi pelayanan fasilitas utama, pendukung dan penunjang terlaksana sesuai dengan SOP yang berlaku guna memberikan pelayanan yang optimal ke masyarakat	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	80	Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan	Jumlah Pelabuhan yang memenuhi SPM dan Jumlah Pelabuhan yang dipantau	80	80	100%	Rp204,558,000	100%	80	Rp16,540,000	100%	8%	Pengawasan Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan sudah terlaksana 100% meliputi kegiatan monitoring kinerja angkutan dan inspeksi keselamatan dengan realisasi anggaran mencapai 8%	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal di pelabuhan SDP	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Maret		Realisasi Bulan Maret		% Capaian Bulan Maret		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab		
								Target Output	Target Anggaran	Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran					
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	Pengadaan dan Pemasangan Faskes LLAJ Prov Lampung (Prioritas Nasional) Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan di Ruas Provinsi Lampung Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) (Prioritas Nasional) Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	80	80	100%	Rp18,644,476,000	100%	0	Rp0	0.0%	0%	Persentase perlengkapan jalan telah terpasang sesuai kondisi kebutuhan masyarakat meliputi kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan, Bantuan Teknis, LRK, serta Pemeliharaan Perlengkapan Jalan. Semua kegiatan masuk dalam Automatic Adjustment	Melaksanakan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebutuhan Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah atau Instansi lain terkait kebutuhan perlengkapan jalan Memastikan semua titik LRK di provinsi lampung dilakukan perbaikan agar mengurangi angka kecelakaan di ruas jalan lampung Melaksanakan pemeliharaan perlengkapan jalan agar tetap terpasang secara sempurna di ruas jalan.	Seksi Lalu Lintas dan Pengawasan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000	Pekan Nasional Keselamatan Jalan Provinsi Lampung Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) (Prioritas Nasional)	1000	1000	100%	Rp 357,143,000	100%	1000	Rp0	0	0%	Kinerja Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan dilaksanakan pada kegiatan Pekan Keselamatan Jalan dan Sadar Lalu Lintas Usia Dini, masing kegiatan masih tahap persiapan.	Mempersiapkan kegiatan agar lebih meriah dan banyak peserta dari umum, sehingga banyak masyarakat tersosialisasikan tentang kesadaran keselamatan bertransportasi.	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK 3.7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	74.8	Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Dikelola Pemeliharaan Alat Uji dan Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor Non Statis	74.8	74.8	100%	Rp 3,012,416,000	100%	74.8	Rp 730,123,000	100%	24.24%	Kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor mencapai 100% dengan kegiatan yaitu Operasional UPPKB dan pemeliharaan alat uji kalibrasi Realisasi anggaran untuk kegiatan tersebut mencapai 24,24%	Mengusulkan SDM pengujian kendaraan bermotor yang berkompeten tiap tahunnya sesuai kebutuhan, Melakukan sosialisasi tentang teknis pengujian kendaraan bermotor. Melaksanakan Pemeliharaan Alat uji kalibrasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku agar alat dalam kondisi baik untuk menguji kendaraan	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas Monitoring Pengendalian Lalu Lintas Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas dan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	80	80	100%	Rp 8,728,379,000	100%	80	Rp1,275,731,286	100%	14.62%	Kinerja Kualitas penyelenggaraan pendukung teknis transportasi darat mencapai 100% meliputi Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat dengan presentase capaian keuangan 14,62 %	Merencanakan perbaikan penyelenggaraan kegiatan monitoring, inspeksi dan pengawasan terhadap angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan di BPTD secara berkesinambungan	Sub Bagian Tata Usaha
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	84	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Gaji dan Tunjangan PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	84	84	100%	Rp33,387,530,000	100%	84	Rp 7,813,610,111	100%	23.40%	Telah dilaksanakan kegiatan penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat telah dilaksanakan 100% meliputi kegiatan Operasional kantor, Pengadaan Perangkat Pengolah data dan Informasi dan Gaji pegawai, realisasi anggaran mencapai 23,4%	Menggunakan kebutuhan kantor yang efektif dan serba guna, melakukan pemeliharaan gedung secara periodik Melaksanakan evaluasi kinerja menggunakan SKP untuk penilaian Tukin Pegawai Menggunakan produk dalam negeri untuk pengadaan perangkat data dan informasi	Sub Bagian Tata Usaha